

**UPAYA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN PROBOLINGGO**

(Studi di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Disusun oleh :
Rayan Bagus Aprianto
105030107111016



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2014

MOTTO

“TERUS BERUSAHA DENGAN SEPENUH JIWA DAN RAGA UNTUK MENJADI MANUSIA YANG BERKUALITAS MELALUI PENCiptAAN PIKIRAN DAN SIKAP YANG MENDEKATI KESEMPURNAAN”

(Rayan Bagus Aprianto)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**Judul Skripsi : Upaya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam Pemberdayaan UKM
Kabupaten Probolinggo (Studi Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Probolinggo)**

Disusun oleh : Rayan Bagus Aprianto

NIM : 105030107111016

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, 15 November 2014

Komisi Pembimbing

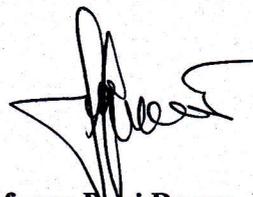
Ketua

Anggota



Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si

NIP. 19690524 200212 2 002



Drs. Stefanus Pani Rengu, M.AP

NIP. 19531113 198212 1 001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan penguji majelis skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 20 November 2014

Jam : 12.00

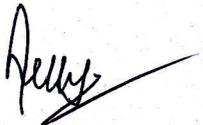
Skripsi atas nama : Rayan Bagus Aprianto

Judul : Upaya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam Pemberdayaan
usaha kecil dan menengah Kabupaten Probolinggo (Studi Pada Dinas
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo)

Dan dinyatakan lulus.

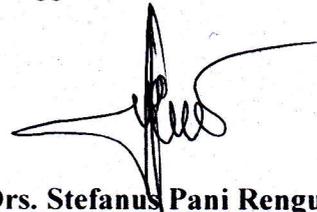
Majelis Penguji

Ketua



Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si
NIP. 196905242002122 002

Anggota



Drs. Stefanus Pani Rengu, M.AP
NIP. 19531113 198212 1 001

Anggota



Drs. Minto Hadi, M.Si
NIP. 19540127 198103 1 003

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, November 2014



Rayan Bagus Aprianto

105030107111016

RINGKASAN

Rayan Bagus Aprianto, 2014. **Upaya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo**. Skripsi. Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. **Dosen Pembimbing: (1) Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si 2) Drs. Stefanus Pani Rengu, M.AP.** 125 Halaman.

UKM merupakan sektor usaha yang dapat menopang perekonomian Indonesia. Tetapi, UKM khususnya di Kabupaten Probolinggo mengalami permasalahan pada sektor sumber daya manusia, pemasaran dan permodalan sehingga Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo berkewajiban menyelesaikan permasalahan tersebut. Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana upaya serta faktor pendukung dan penghambat Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam melakukan pemberdayaan UKM Kabupaten Probolinggo. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui upaya serta faktor pendukung dan penghambat Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam pemberdayaan UKM Kabupaten Probolinggo.

Metodologi penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian adalah upaya pemberdayaan UKM dalam hal peningkatan mutu sumber daya manusia, pameran produk UKM serta bantuan akses permodalan beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Lokasi dan situs penelitian adalah Dinas Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian analisa data yang digunakan adalah model analisa interaktif dengan empat prosedur yaitu mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data, lalu kemudian menarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian, bahwa upaya pemberdayaan UKM dilakukan dalam hal peningkatan mutu sumber daya manusia, pameran produk UKM serta bantuan akses permodalan. Upaya pemberdayaan tersebut dilakukan Dinas Koperasi Usaha Menengah Kabupaten Probolinggo dengan menyelenggarakan program pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia. Program kredit modal kerja untuk membantu akses permodalan. Program promosi dagang untuk mengenalkan produk UKM agar dapat dikenal masyarakat. Faktor pendukung yaitu adanya dukungan dari pemerintah. Sedangkan faktor penghambat dalam hal peningkatan mutu sumber daya manusia yaitu keterbatasan jumlah tenaga ahli dan terbatasnya anggaran. Pameran produk UKM yaitu pelaku usaha kecil dan menengah sering beralih produk. Bantuan akses permodalan yaitu usaha kecil dan menengah kurang responsif.

Kesimpulan dari penelitian adalah pemberdayaan UKM dalam hal peningkatan mutu sumberdaya manusia dilakukan melalui program pembinaan dan pelatihan. Pameran produk UKM dilakukan melalui program promosi dagang. Bantuan akses permodalan melalui program kredit modal kerja. Faktor pendukung yaitu adanya dukungan dari pemerintah. Sedangkan faktor penghambat dalam hal peningkatan mutu sumber daya manusia yaitu keterbatasan jumlah tenaga ahli dan terbatasnya anggaran. Pameran produk UKM yaitu pelaku usaha kecil dan menengah sering beralih produk. Bantuan akses permodalan yaitu usaha kecil dan menengah kurang responsif. Rekomendasi penelitian adalah diklat dan pelatihan kepada pegawai, penyajian ulang anggaran, mempermudah proses pengajuan kredit modal kerja, meningkatkan komunikasi antara dinas dan pelaku UKM, pendataan UKM secara berkala di Kabupaten Probolinggo.

SUMMARY

Rayan Bagus Aprianto, 2014. **Efforts Department of Cooperatives Small and Medium Enterprises in Empowerment Small and Medium Enterprises Regency Probolinggo.** Thesis. Department of Public Administration, Faculty of Administration, University of Brawijaya. **Advisors : (1) Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si 2) Drs. Stefanus Pani Rengu, M.AP.** 125 Pages.

Small and Medium Enterprises is a business sector can sustain economy of Indonesia. However, Small and Medium Enterprises especially Regency Probolinggo has problems in sector human resources, marketing and capital so the Department of Cooperatives Small and Medium Enterprises obliged to resolve problems through the implementation of the empowerment of small and medium Enterprises. The problem research is how effort, factors supporting and inhibiting Department of Cooperatives Small and Medium Enterprises in empowerment of small and medium Enterprises. The purpose research is to determine the effort, factors supporting and inhibiting Department of Cooperatives Small and Medium Enterprises in empowerment of small and medium Enterprises.

Metedologi research use descriptive research and qualitative approaches. The focus of research is empowerment of Small and Medium Enterprises of improving quality of human resources, exhibitions product and help access capital and factor supporting and inhibiting. The location and site of research is Department of Cooperatives Small and Medium Enterprises. Techniques collection data use interview, observation and documentation. Then analysis of data use model analysis interactive with four procedures that collect data, reducing data, present data, and conclusions

Results of research that the Department of Cooperatives Small and Medium Enterprises do efforts empowerment of Small and Medium Enterprises through improving quality of human resources, product exhibitions and help access to capital through implementation programs. Program coaching and training to improve quality of human resources. Program credit capital work for help access of capital. program promotion trade is effort for introduce products. Factor supporting is support of government. Factor inhibiting of improving quality of human resources is limited number of experts and limited budget. Exhibition products is small and medium enterprises substitute products. While help access to capital is small and medium enterprises less responsive.

Conclusion research is empowerment of improving quality of human resources done program coaching and training. Exhibition products done program promotion trade. Help access capital done program credit capital work. Factors supporting is support of government. While factor inhibiting of improving quality of human resources is limited number of experts and limited budget. Exhibition products is small and medium enterprises substitute products. help access to capital is small and medium enterprises less responsive. Recommendations research is training for employees, representation of budget, simplify process of credit capital work, improve communication between department and Small and Medium Enterprises, collection data Small and Medium Enterprises on regular in Regency Probolinggo.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Upaya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam Pemberdayaan UKM Kabupaten Probolinggo**. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik (SAP) pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

- Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
- Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si. selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
- Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si. selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang serta selaku Ketua Pembimbing Skripsi yang telah sabar dan ikhlas memberi bimbingan serta masukan dalam proses penyelesaian skripsi.
- Bapak Drs. Stefanus Pani Rengu, M.AP selaku Anggota Pembimbing Skripsi yang telah sabar dan ikhlas memberi bimbingan serta masukan dalam proses penyelesaian skripsi.
- Seluruh Dosen Pengajar Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
- Kepala Dinas Usaha Kecil dan Menengah dan perangkat kerjanya, yang telah berkenan memberikan ijin dan bantuan selama proses penelitian.
- Rekan-rekan mahasiswa angkatan 2010 yang telah banyak membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.
- Dan teman-teman, sahabat-sahabat, maupun kerabat yang masih belum disebutkan namanya disini, penulis meminta maaf atas keterbatasan yang penulis miliki. Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua dan semoga dalam lindunganNya.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, November 2014

Rayan Bagus Aprianto



HALAMAN PERSEMBAHAN

Waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Jika waktu telah berlalu memang sangatlah merugikan, tapi hasil yang telah dicapai ini tidak akan pernah menjadi sebuah penyesalan. Terima kasih kepada ALLAH SWT atas waktu yang telah Beliau berikan untukku hingga aku bisa menjadi seperti sekarang ini.

Untuk yang pertama, skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta yang selalu ada buat aku dan yang selalu mengajarku arti hidup, **Moch Ramli dan Sugiarti**. Sosok yang pertama dari tujuan hidupku dan selalu menjadi motivator dan inspirator dalam hidupku. Terima kasih ALLAH SWT telah Engkau berikan padaku malaikatMu, terima kasih telah Engkau lahirkan aku dari rahimnya. Dan juga kepada kakakku, **Dani Setiadi Purnama** serta Adikku, **Eris Oktaria Umami**. Mereka tidak henti-hentinya selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas semua pengorbanan yang telah diberikan, baik biaya, tenaga, perhatian, terlebih lagi suntikan doa. Dalam mengerjakan skripsi pasti tidak jauh dari kata stres dan jenuh. Beban pikiran pasti selalu ada, tetapi berkat orang-orang ini aku bisa sedikit mengurangi beban tersebut. Makasih semuanya :

- Special buat calon istriku *Sindy Dwi Riski Amelia*. Terima kasih buat semua candaan, omelan, bantuan dan arahan yang terus mengiringiku dalam mengerjakan skripsi ini hingga tengah malam.
- Terima kasih buat semua sahabat-sahabatku dari, *Nugroho Ardwi, Sovin Haryanto, Restian Wicahyo, Faktur Rohman, Daniel Eko Pranoto, Firdaus Ali Firmansyah, Yulianto, Ruly Julius, Teguh, Niki Pancasila, Edo Prasetyo, Nur Fadillah, Fajar Ilyas, Arin Tri Octavianti, Redi Puja Kesuma, Dini Siswanto, Wahyu, Deni Tri Laksono* dan sahabat - sahabatku di *Kos Wisma 59*. Terima kasih telah mengajarkanku arti kehidupan dan persahabatan. Semoga tali silaturahmi kita tidak putus hingga anak cucu kelak dan kita semua menjadi orang yang sukses.
- Buat perguruan silat *Sangkula Ghataka Raksaka Kausala, No Band, dan RAMS Management* saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan pengalamanya dalam berlatih silat dan seni. Berkat kalian semua aku belajar arti kekompakan dan uji mental. Kuharap kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan.

- Buat teman-teman seperjuangan FIA Publik 2010. Terima kasih atas doa dan bantuan kalian semua yang telah memberikan dukungan dan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Thank's Guys, sukses buat kita semuanya
- Buat semua elemen yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang juga telah sangat membantu proses pengerjaan skripsi ini. Semoga ALLAH SWT akan membalas budi baik semua pihak yang telah membantu pelaksanaan hingga terselesaikannya skripsi ini.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
TANDA PENGESAHAN	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Administrasi Publik	14
1. Administrasi	14
1.1 Pengertian Administrasi	14
1.2 Karakteristik Administrasi	15
2. Administrasi Publik	15
2.1 Pengertian Administrasi Publik	15
2.2 Peran Administrasi Publik	17
B. Administrasi Pembangunan	18
1. Pengertian Administrasi Pembangunan	18
2. Paradigma Administrasi Pembangunan	20

C. Pemberdayaan.....	24
1. Pengertian Pemberdayaan.....	25
2. Tahap – Tahap Pemberdayaan.....	28
3. Strategi Pemberdayaan.....	29
4. Pendekatan Pemberdayaan.....	29
5. Model – Model Pemberdayaan.....	32
D. Usaha Kecil dan Menengah.....	34
1. Pengertian Usaha Kecil dan Menengah.....	34
2. Kriteria Usaha Kecil dan Menengah.....	36
3. Masalah yang Dihadapi UKM.....	38
4. Strategi Pengembangan UKM.....	42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	47
B. Fokus Penelitian.....	48
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	51
D. Sumber Data.....	51
E. Jenis Data.....	51
F. Teknik Pengumpulan Data.....	52
G. Instrumen Penelitian.....	56
H. Teknik Analisis Data.....	57
I. Keabsahan Data.....	61

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Kabupaten Probolinggo	
a. Geografis.....	62
b. Demografi.....	63
c. Potensi.....	64
d. HasilBumi.....	64
e. NilaiBudaya.....	64
2. DinasKoperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo	
a. Struktur Organisasi.....	65
b. Visi dan Misi.....	67

c. Sasaran.....	67
d. Kebijakan.....	68
e. Program.....	68
B. Penyajian Data	
1. Upaya Pemberdayaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terhadap UKM Kabupaten Probolinggo	
a. Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia.....	70
b. Pameran Produk UKM.....	74
c. Bantuan Akses Permodalan	79
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam Pemberdayaan UKM Kabupaten Probolinggo	
2.1 Faktor Pendukung.....	89
a. Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia.....	89
b. Pameran Produk UKM.....	91
c. Bantuan Akses Permodalan	92
2.2 Faktor Penghambat.....	93
a. Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia.....	93
b. Pameran Produk UKM.....	96
c. Bantuan Akses Permodalan	98
C. Analisis dan Pembahasan	
1. Upaya Pemberdayaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terhadap UKM Kabupaten Probolinggo	
a. Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia.....	100
b. Pameran Produk UKM.....	103
c. Bantuan Akses Permodalan	106
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam Pemberdayaan UKM Kabupaten Probolinggo	
2.1 Faktor Pendukung.....	107
a. Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia.....	107
b. Pameran Produk UKM.....	108
c. Bantuan Akses Permodalan	108

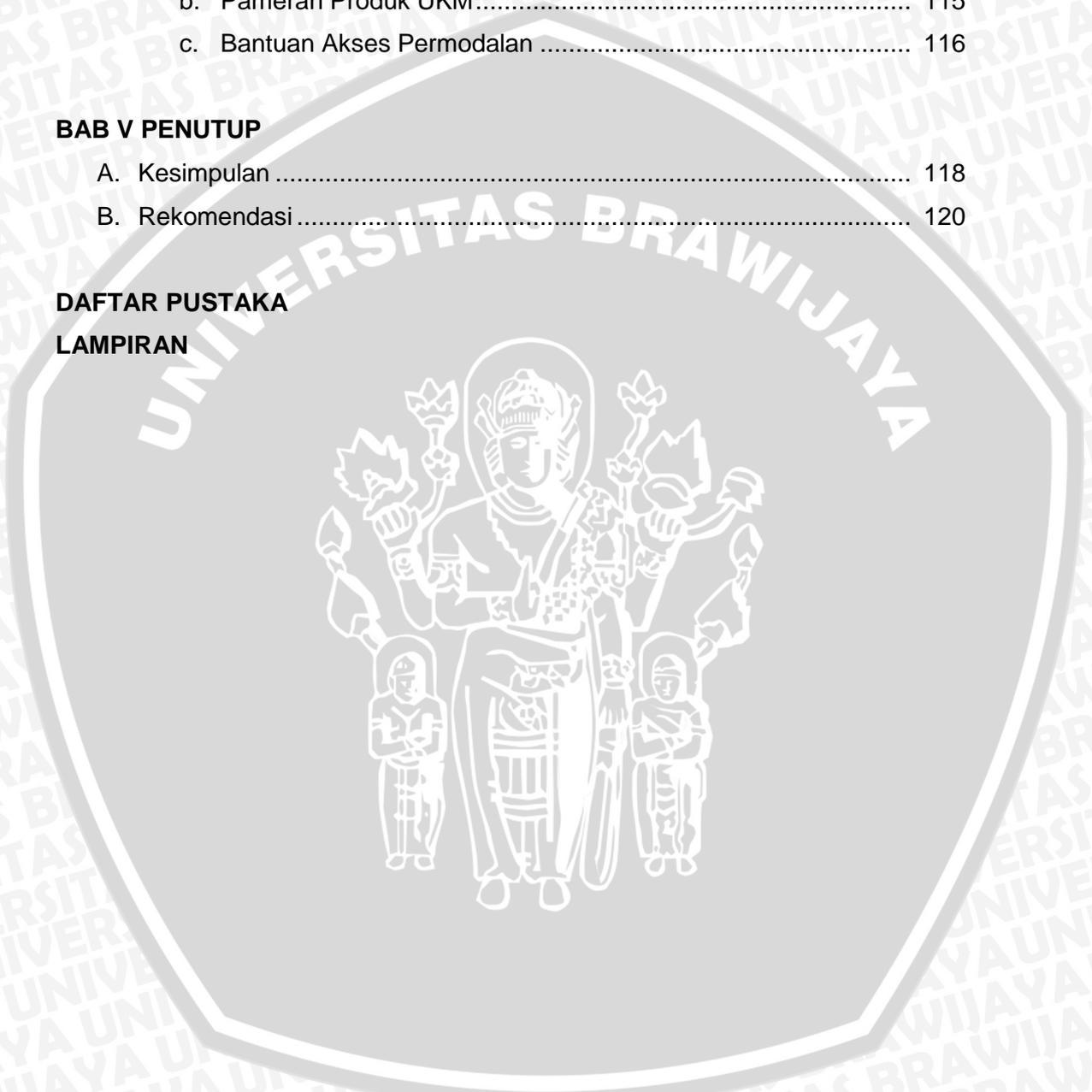
2.2 Faktor Penghambat.....	112
a. Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia.....	112
b. Pameran Produk UKM.....	115
c. Bantuan Akses Permodalan	116

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	118
B. Rekomendasi	120

DAFTAR PUSTAKA

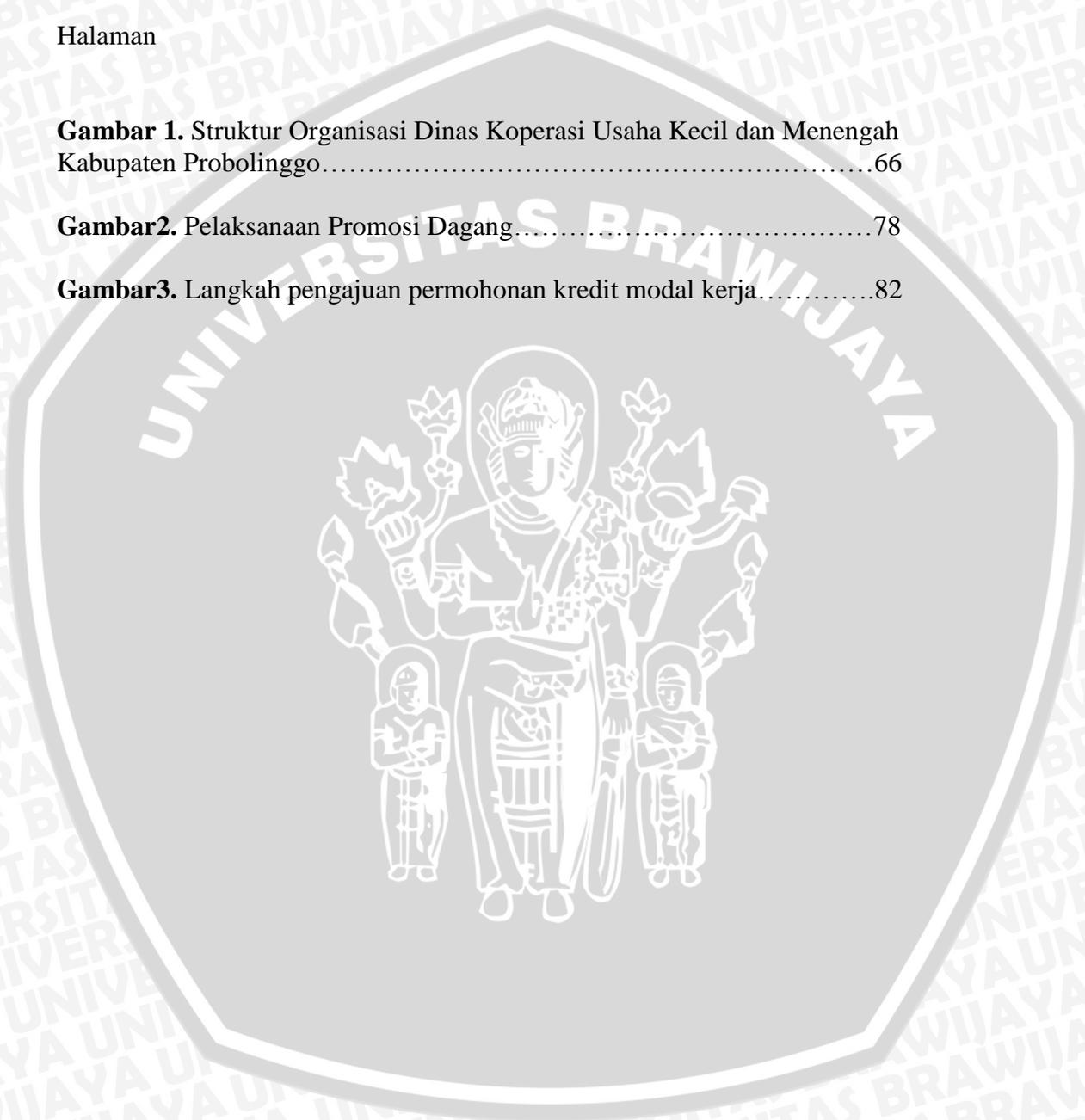
LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo.....	66
Gambar2. Pelaksanaan Promosi Dagang.....	78
Gambar3. Langkah pengajuan permohonan kredit modal kerja.....	82



DAFTAR TABEL

Halaman

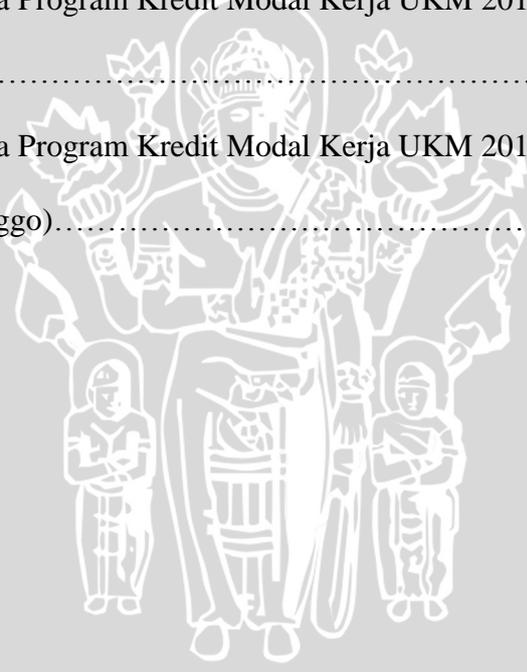
Tabel 1. Pelaksanaan Pembinaan dan Pelatihan UKM Tahun 201372

Tabel 2. Promosi Dagang UKM Tahun 2013 76

Tabel 3. Realisasi Dana Program Kredit Modal Kerja UKM 2013 (Bank Jatim Cabang Kraksaan).....69

Tabel 4. Realisasi Dana Program Kredit Modal Kerja UKM 2013 (Bank Jatim Cabang Probolinggo).....87

Tabel 5. Realisasi Dana Program Kredit Modal Kerja UKM 2013 (Bank UMKM Jatim Cabang Probolinggo).....88



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2007 - 2008 mengakibatkan sektor riil terutama usaha besar dihadapkan pada persoalan pelik. Mereka sulit mengembalikan eksistensinya untuk kembali normal. Strategi yang dilakukan untuk mengatasi hal itu adalah mengurangi biaya produksi agar kerugian dapat ditekan. Salah satu komponen biaya produksi yang menjadi sasaran mereka adalah upah buruh dan gaji karyawan.

Kesulitan usaha besar memulihkan kembali kondisi mereka disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, krisis ekonomi nasional belum sepenuhnya pulih. Kedua, tidak memiliki jiwa wirausaha yang tangguh. Keberhasilan usaha besar kebanyakan ditopang jasa baik pemimpin politiknya. Karena itu, ketika patronnya hancur, ikut bergugurlah mereka. Ketiga, semakin ketatnya persaingan di era globalisasi sehingga keberadaan usaha besar tersebut sulit dipertahankan.

Dengan melihat hal tersebut maka usaha kecil dan menengah akan memainkan peran utama dalam perekonomian bangsa Indonesia karena mereka memiliki efisiensi tinggi maka peluang usaha kecil dan menengah akan mendominasi ke depannya. Ketika usaha besar ambruk terhantam krisis, banyak usaha kecil dan menengah dengan tingkat ketergantungan kepada bank dan pasar saham relatif kecil tetap dapat bertahan. Perkembangan usaha kecil, dan menengah yang demikian penting menyiratkan bahwa terdapat potensi yang besar atas kekuatan domestik. Jika hal ini dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik, tentu akan dapat mewujudkan usaha kecil dan menengah yang tangguh.

Oleh karena itu, Keberadaan Usaha kecil dan menengah merupakan sektor usaha yang dapat menopang perekonomian Indonesia. Usaha kecil dan menengah juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan sumber pendapatan daerah maupun masyarakat lokal. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Di dalam Undang – Undang tersebut pada pasal 1 pengertian usaha kecil dan menengah diartikan seara terpisah, yaitu :

- a. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan

yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang – undang ini.

- b. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang – undang ini.

Keberadaan usaha kecil dan menengah mempunyai tujuan, yaitu seperti yang tercantum pada pasal 3 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Keberadaan usaha kecil dan menengah tidak bisa dipungkiri adalah suatu badan usaha yang sangat membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Seperti yang sudah diketahui Indonesia pernah mengalami krisis moneter pada tahun 1997 – 1998 yang mengakibatkan ketidakstabilan perekonomian. Usaha kecil dan menengah tetap bisa bertahan bahkan bisa menembus pasar yang selama ini dikuasai perusahaan besar. Usaha kecil dan menengah juga telah mampu membuktikan kelangsungan usahanya dapat bertahan dari terpaan krisis ekonomi , sehingga mampu menyelamatkan perekonomian Indonesia.

Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu yang menempatkan usaha kecil dan menengah pada posisi yang strategis untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini didukung oleh dengan jumlah yang cukup banyak usaha kecil dan menengah yang berada di Kabupaten Probolinggo. Terdapat 7400 UKM yang tersebar di Kabupaten Probolinggo. Di Kabupaten Probolinggo memiliki usaha kecil dan menengah yang memiliki berbagai macam bidang usaha dan mempunyai potensi yang besar jika usaha kecil dan menengah yang ada dapat dikembangkan dengan sungguh – sungguh dan maksimal. Bidang usaha tersebut, yaitu makanan, minuman, konveksi dan masih banyak lagi.

Tetapi keberadaan usaha kecil dan menengah bukan berarti tidak mengalami masalah. Hasil pengamatan ada beberapa hal yang harus

mendapatkan pembinaan terhadap keberadaan usaha kecil, dan menengah di Indonesia menurut Tambunan (2002:73), antara lain :

a. Kesulitan pemasaran

Hasil dari studi lintas Negara yang dilakukan oleh James dan Akarasanee (1988) di sejumlah Negara ASEAN menyimpulkan salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran yang umum dihadapi oleh pengusaha UKM adalah tekanan-tekanan persaingan, baik dipasar domestik dari produk-produk yang serupa buatan pengusaha-pengusaha besar dan impor, maupun dipasar ekspor.

b. Keterbatasan finansial

Usaha kecil dan menengah di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek finansial antara lain: modal (baik modal awal maupun modal kerja) dan finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan output jangka panjang.

c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan sumber daya manusia juga merupakan salah satu kendala serius bagi UKM di Indonesia, terutama dalam aspek-aspek kewirausahaan, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, control kualitas, akuntansi, mesin-mesin, organisasi, pemrosesan data, teknik pemasaran, dan penelitian pasar. Semua keahlian tersebut sangat diperlukan untuk mempertahankan atau memperbaiki kualitas produk, meningkatkan efisiensi dan produktifitas dalam produksi, memperluas pangsa pasar dan menembus pasar baru.

d. Masalah bahan baku

Keterbatasan bahan baku dan input-input lain juga sering menjadi salah satu masalah serius bagi pertumbuhan output atau kelangsungan produksi bagi UKM di Indonesia. Terutama selama masa krisis, banyak sentra-sentra usaha kecil dan menengah seperti sepatu dan produk-produk textile mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku atau input lain karena harganya dalam rupiah menjadi sangat mahal akibat depresiasi nilai tukar terhadap dolar AS.

e. Keterbatasan teknologi

Berbeda dengan Negara-negara maju, UKM di Indonesia umumnya masih menggunakan teknologi tradisonal dalam bentuk mesin-mesin tua atau alat-alat produksi yang sifatnya manual. Keterbelakangan teknologi ini tidak hanya membuat rendahnya jumlah produksi dan efisiensi di dalam proses produksi, tetapi juga rendahnya kualitas produk yang dibuat serta

kesanggupan bagi UKM di Indonesia untuk dapat bersaing di pasar global. Keterbatasan teknologi disebabkan oleh banyak faktor seperti keterbatasan modal investasi untuk membeli mesin-mesin baru, keterbatasan informasi mengenai perkembangan teknologi, dan keterbatasan sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan mesin-mesin baru.

Hal ini sesuai dengan hasil pra penelitian di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bp. Soengeng selaku Kepala Seksi Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo yang dilakukan pada tanggal 17 maret 2014. Beliau menyatakan bahwa usaha kecil menengah di Kabupaten Probolinggo pada umumnya mengalami permasalahan seperti permodalan, sumber daya manusia dan pemasaran. Pernyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan Bp. Bambang Supriadi selaku Kepala Bagian Bina Usaha Kecil dan Menengah Dinas Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo yang menyatakan bahwa permasalahan Usaha Kecil dan menengah tidak jauh berbeda dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh usaha kecil, dan menengah di berbagai daerah di Indonesia yaitu pertama, sumber daya manusia, kedua, pemasaran, ketiga, permodalan. Dengan melihat dua pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan secara jelas bahwa permasalahan usaha kecil, dan menengah di Kabupaten Probolinggo pada segi sumber daya manusia, pemasaran dan permodalan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa usaha kecil dan menengah di Kabupaten

Probolinggo masih belum berjalan secara maksimal sehingga akan sulit untuk berkembang.

Melihat permasalahan yang dihadapi usaha kecil dan menengah di Kabupaten Probolinggo tersebut, maka dibutuhkan peran dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo yang berkewajiban untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil, dan menengah. Usaha kecil dan menengah perlu diberdayakan karena selain memberikan kontribusi dalam perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat di daerah masing – masing daerah juga dapat mewujudkan peningkatan kegiatan perekonomian di suatu daerah untuk mencapai suatu kemandirian masyarakat

Menurut Undang – Undang 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pasal 1 ayat 8 menyatakan pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha pembinaan, dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Sedangkan menurut Suryono (2010 : 262) pemberdayaan mengacu pada *empowerment* yaitu upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat tertentu. Salah satu pendekatan pemberdayaan masyarakat local yang mandiri. Artinya

pemberdayaan masyarakat diharapkan memberikan peranan yang signifikan kepada individu – individu sebagai pelaku yang menentukan hidup mereka.

Pemberdayaan merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh pemerintah agar dapat membangun usaha kecil dan menengah untuk semakin berkembang. Sesuai pasal 5 Undang – Undang Nomor 20 tahun 2008, tujuan pemberdayaan adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. Meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Upaya pemberdayaan usaha kecil dan menengah yang dilakukan oleh pemerintahan daerah melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo yaitu meliputi peningkatan mutu sumber daya manusia melalui program pembinaan dan pelatihan sumber daya manusia, akses terhadap bantuan permodalan melalui program kredit modal kerja, dan pengenalan produk usaha kecil dan menengah melalui promosi dagang.

Pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo masih belum optimal karena masih terdapat beberapa permasalahan yang dialami oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo. Permasalahannya yaitu jumlah tenaga ahli yang terbatas, kesulitan dalam permodalan usaha kecil dan menengah serta pelaku usaha kecil dan menengah yang sering beralih produk. Pendukung dalam upaya pemberdayaan yaitu dengan peningkatan mutu sumber daya manusia, memberikan bantuan akses permodalan serta memperkenalkan produk usaha kecil dan menengah. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti memilih judul : **“Upaya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Probolinggo.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Probolinggo?

2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam melakukan pemberdayaan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Probolinggo

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Probolinggo
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat dan pendukung Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Probolinggo

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bermanfaat secara akademik maupun paraktis bagi pihak-pihak yang membutuhkannya. Secara umum manfaat yang ingin dicapai adalah:

1. Manfaat Akademik

- a. Output dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah pemahaman mengenai upaya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Probolinggo.
- b. Sebagai bahan kajian dan sumbangan pemikiran yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan yang dilakukan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terhadap usaha kecil dan menengah di Kabupaten Probolinggo.
- c. Diharapkan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang upaya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Probolinggo.
- d. Sebagai bahan bacaan dan referensi bagi peneliti yang selanjutnya dalam tema yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti: Mengembangkan sikap kritis peneliti terhadap upaya pemberdayaan yang dilakukan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terhadap usaha kecil dan menengah di Kabupaten Probolinggo

- b. Output dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan berupa faktor-faktor apa sajakah yang harus diperhatikan dalam upaya pemberdayaan usaha kecil dan menengah oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran dan arahan selama melakukan penulisan dan penelitian ini, maka sistematikan pembahasan yang direncanakan adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran mengenai latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Pembahasan tersebut.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini mengungkapkan tentang metode penelitian yang digunakan, fokus penelitian, penentuan lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data dan keabsahan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini secara garis besar mencakup deskripsi atau gambaran umum mengenai obyek penelitian, analisis dan interpretasi data yang diawali dengan penyajian dan selanjutnya akan diuraikan dan dibahas analisis masalah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran-saran yang ditemukan berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian. Kesimpulan berisi tentang temuan pokok yang menjawab tujuan penelitian. Saran merupakan rekomendasi yang dibuat berdasarkan hasil penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

1. Administrasi

1.1 Pengertian Administrasi

Pengertian administrasi menurut Darmadi dan Sukidin (2009:4) menyatakan pengertian administrasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu arti sempit dan arti luas. Berikut ini adalah penjelasannya :

- a. Arti sempit, administrasi merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan dan informasi secara sistematis serta memudahkan memperolehnya kembali
- b. Arti luas, istilah administrasi berhubungan dengan kegiatan kerjasama yang dilakukan manusia atau sekelompok orang sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Namun tidak semua kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang bisa disebut administrasi

Sedangkan pengertian lain administrasi menurut Siagian (2004:2), “Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Berdasarkan uraian definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi merupakan seluruh kegiatan yang dilakukan sekelompok aktor melalui kerjasama dalam suatu organisasi berdasarkan rencana dan untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan.

1.2 Karakteristik Administrasi

Dalam Pasolong (2012:51) terdapat 3 karakteristik administrasi, yakni:

- 1) Efisien. Berarti tujuan (*motive*) dari pada administrasi adalah untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien. James L. Gibson dkk. (1996:51) mengatakan bahwa efisien adalah perbandingan rasio keluaran dengan masukan.
- 2) Efektifitas. Berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. James L. Gibson dkk. (1996:38) mengatakan bahwa efektifitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama.
- 3) Rasional. Berarti bahwa tujuan yang telah dicapai bermanfaat untuk maksud yang berguna, tetapi tentu saja yang dilakukan dengan sadar dan disengaja. Menurut Herbert A. Simon (2004:135) mengatakan bahwa rasional secara objektif adalah jika tujuan yang hendak dicapai untuk kepentingan organisasi. Sedangkan rasional secara subjektif adalah jika tujuan yang hendak dicapai untuk kepentingan pribadi.

2. Administrasi Publik

2.1 Pengertian Administrasi Publik

- 1) Chander dan Plano dalam Keban (2008:3) mengatakan :

“Proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik”.

- 2) Siagian (1996:8) mengatakan :

“Administrasi publik adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintahan dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara”.

3) David H. Rosenbloom (2005) dalam Pasolong (2012:56) mengatakan :

“Administrasi publik merupakan pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik dan hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah di bidang legislatif, eksekutif dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan maupun sebagian.

Dari beberapa definisi di atas jelas sekali menunjukkan aktivitas administrasi publik yaitu pelaksanaan kekuasaan politik atau kebijakan publik. Selain itu jelas sekali menunjukkan peran khusus administrasi publik yaitu sebagai pelaksana kebijakan politik. Definisi administrasi publik tersebut banyak dipengaruhi oleh paradigma negara yang mendikotamikan politik dengan administrasi negara, yaitu suatu aliran pemikiran teoritik yang memisahkan peran politik di satu pihak yaitu merumuskan kebijakan publik dan di pihak lain administrasi negara berperan hanya sekedar sebagai pelaksana kebijakan publik tersebut. Sedangkan pengertian Administrasi Publik dilihat dari perspektif diartikan sebagai “*what government does*” (apa yang dikerjakan pemerintah), baik langsung maupun tidak langsung, sebagai suatu tahapan siklus pembuatan kebijakan publik, sebagai implementasi kepentingan publik dan sebagai kegiatan yang dilakukan secara kolektif karena tidak dapat dikerjakan secara individu.

2.2 Peran Administrasi Publik

Administrasi publik memiliki peran atau pengaruh yang sangat vital dalam suatu negara. Pelaksanaan Administrasi Publik mempunyai peran untuk memberikan pelayanan publik dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat setelah pemerintah meningkatkan profesionalismenya. Dan hal ini harus dilakukan secara efektif melalui inovasi, prinsip-prinsip good governance, pemanfaatan teknologi, penguatan institusi publik, partisipasi, pengembangan kapasitas, desentralisasi pemberian pelayanan, pemberdayaan, dan kemitraan sektor publik dan swasta.

Seperti yang di artikan oleh Cleveland dalam Pasolong (2007:10), Peran seorang administrator publik adalah untuk menganalisis kebijakan publik sehingga mereka keluar dalam konteks yang tepat dan akhirnya diimplementasikan sebagai kebijakan yang menguntungkan orang-orang pada umumnya. Kaitannya dengan pemberdayaan adalah selain analisis kebijakan juga seorang pengambil kebijakan yang bertujuan untuk membangun, sehingga dari kebijakan tersebut diambil suatu sikap/putusan yang merupakan salah satu dari upaya pembangunan.

B. Administrasi Pembangunan

1. Pengertian Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan menurut Afiffudin (2010:51) administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan – keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adapun pengertian pembangunan menurut Suryono (2010:1), yaitu :

“Pembangunan berasal dari kata bangun yang berarti sadar, siaman, bangkit, berdiri dan juga berarti bentuk. Dalam kata kerja, bangun juga berarti membuat, mendirikan, atau membina. Sehingga dapat dikatakan pembangunan meliputi bentuk, kehidupan, dan perilaku. Lebih dari kata itu, pembangunan telah menjadi bahasa dunia. Keinginan bangsa – bangsa mengejar, bahkan memburu masa depan yang lebih baik menurut kondisi dan tata cara masing – masing, melahirkan berbagai konsep yang antara lain pertumbuhan, rekonstruksi, modernisasi, westernisasi, perubahan social, pembebasan, pembaharuan pembangunan bangsa pembangunan nasional, pembangunan, pengembangan dan pembinaan”.

Selanjutnya menurut Siagian yang dikutip oleh Suryono (2010:2) menyatakan bahwa pembangunan adalah sebagai suatu arah atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan suatu bangsa, Negara, pemerintah secara sadar menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Sedangkan menurut Bryant dan White (1982) yang dikutip oleh Suryono (2010:2) menyatakan pembangunan adalah upaya

meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya dengan memiliki lima implikasi utama, antara lain :

- a. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan manusia secara optimal, baik individu maupun kelompok
- b. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan, pemerataan nilai, dan kesejahteraan
- c. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesepakatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan untuk memutuskan
- d. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri
- e. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan Negara satu kepada negara lain, menciptakan hubungan saling menguntungkan dan menghormati.

Sedangkan, administrasi pembangunan menurut Siagian (2012:5) adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari administrasi pembangunan adalah segala upaya yang dilakukan oleh suatu negara untuk tumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana di semua segi kehidupan dan penghidupan yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan tertentu serta untuk menuju perubahan yang lebih baik daripada sebelumnya.

2. Paradigma Pembangunan

Pengertian paradigma menurut Suryono (2010:114) adalah sebagai cara pandang terhadap suatu persoalan yang di dalamnya terdapat sejumlah asumsi tertentu, teori tertentu, metodologi tertentu, model tertentu dan solusi tertentu. Dengan begitu antara paradigma yang satu dengan yang lain tidak dapat disamakan, tetapi dapat dibandingkan nantinya. Sejarah perkembangan pembangunan mengalami evolusi makna pembangunan dari tahun ke tahun, yaitu hingga paradigma pertumbuhan hingga paradigma baru dalam pembangunan. Di dalam suatu negara tentunya menganut paradigma yang sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat itu agar pembangunan yang dilakukan nantinya akan mencapai tujuan yang dicita – citakan. Paradigma tersebut yaitu :

a. Paradigma pertumbuhan

Dalam paradigma ini, pembangunan nasional suatu negara akan berkonsentrasi pada pembangunan di sector ekonomi yang nantinya akan mengarah pada pertumbuhan. Yang dimaksud pertumbuhan disini adalah kenaikan pendapatan nasional dalam jangka waktu tertentu. Menurut Suryono (2010:115) menyatakan bahwa strategi ini dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan nasional.

Berdasarkan hasil temuan penelitian Seers (1972) yang dikutip oleh Suryono (2010:116) menyatakan bahwa pada negara berkembang mengabaikan masalah pemerataan baik berupa masalah kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Di negara berkembang hanya sekelompok masyarakat yang memperoleh hasil dari pembangunan, oleh karena itu masalah yang dihadapi oleh negara berkembang semakin kompleks. Itu terbukti dengan adanya peningkatan pengangguran, urbanisasi, marginalisasi masyarakat miskin dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, paradigma pembangunan mulai bergeser menjadi paradigma pertumbuhan dan pemerataan pembangunan.

b. Paradigma Pertumbuhan dengan Pemerataan

Menurut Seers (1972) yang dikutip oleh Suryono (2010;116–117) menyatakan strategi ini lebih berorientasi pada pengelolaan dan investasi sumber daya manusia dan pembangunan sosial di dalam suatu proses pembangunan. Tetapi, setelah menerapkan paradigma ini masih besar sifat ketergantungan negara berkembang terhadap negara maju. Misalnya saja ketergantungan di bidang investasi, bantuan luar negeri dan konsumsi. Oleh karena itu, dengan belum berhasilnya pembangunan dengan mengacu paradigma ini maka bergeser ke paradigma berkelanjutan.

c. Paradigma Teknologi Tepat Guna

Paradigma ini, menyatakan bahwa perluasan kesempatan kerja tidak harus dilakukan melalui pengembangan kebutuhan pola – pola masyarakat, akan tetapi dilakukan melalui penciptaan barang – barang produksi melalui cara – cara yang bersifat padat karya. Tetapi pendekatan ini, dianggap tidak dapat maksimal dalam penciptaan pendapatan dan pertumbuhan nasional dalam rangka mengurangi kesenjangan ekonomi yang semakin lebar. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan pengembangan teknologi yang tepat guna di negara berkembang, antara lain :

1. Tidak adanya institusi yang secara khusus bertugas untuk mengembangkan teknologi tepat guna
2. Selisih harga yang cukup besar antara teknologi impor dengan menciptakan sendiri teknologi baru
3. Sistem nilai yang tidak mendukung, peneliti dan praktisi lebih suka bekerja dengan teknologi tinggi daripada teknologi madya, walaupun teknologi sederhana sudah diketahui secara luas akan dapat menampung tenaga kerja lebih banyak dan ramah lingkungan.

d. Paradigma Kebutuhan Dasar

Menurut Haq (1973) yang dikutip oleh Suryono (2010:19) menyatakan bahwa pendekatan ini merupakan serangan langsung terhadap kemiskinan. Paradigma ini lahir karena adanya kekecewaan yang semakin besar terhadap pertumbuhan Produk Nasional Bruto (GDP) yang semakin rendah. Konsep dasar dari pendekatan ini adalah dengan menyediakan kebutuhan minimum bagi penduduk yang tergolong miskin. Pendekatan yang

dikonsepkan seharusnya pendekatan *central planning* melainkan lebih bersifat *community development*.

e. Paradigma Berkelanjutan

Menurut Friedmann (1992) yang dikutip oleh Suryono (2010:21) menyatakan bahwa konsep *empowerment* muncul karena adanya dua premis mayor, yaitu terdiri dari kegagalan harapan. Kegagalan harapan yang dimaksud disini adalah gagalnya model – model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi serta selanjutnya mengatasi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan harapan disini muncul karena adanya alternatif – alternatif pembangunan yang dimasukkan nilai – nilai demokrasi, persamaan *gender*, persamaan antar generasi dan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Konsep *empowerment* disini adalah sebagai konsep alternatif pembangunan yang pada garis besarnya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, melalui partisipasi, demokrasi langsung dan pembelajaran social melalui pengalaman langsung. Konsep ini merupakan hasil kerja dari berbagai proses interaktif di tingkat ideologis maupun praktis. Di tingkat ideologis, konsep *empowerment* merupakan hasil dari interaksi antara tiga konsep, yaitu “top down dan bottom up”, antara

“growth strategy dan people-centered strategy”. Sedangkan di tingkat praktis, interaktif akan terjadi lewat pertarungan antar otonomi.

B. Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Pengertian pemberdayaan menurut Randy and Riant (2007) yang dikutip oleh Nasirin dan Alamsyah (2010:63) menyatakan pemberdayaan adalah suatu proses menyeluruh dari para motivator, fasilitator, dan masyarakat yang perlu diperdayakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan serta memberikan kemudahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan pengertian lain dari pemberdayaan menurut Pranaka dan Moeljarto (1996:44). Pemberdayaan adalah sebuah konsep yang lahir dari perkembangan alam pikiran masyarakat. Pemberdayaan dipandang sebagai proses belajar mengajar yang merupakan usaha yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan secara berkesinambungan baik bagi individu maupun kolektif guna mengembangkan daya dan kemampuan yang terdapat dalam individu atau kelompok.

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari pemberdayaan adalah suatu usaha bersama yang dilakukan

untuk untuk merubah dari yang tidak berdaya menjadi berdaya dengan tujuan untuk mencapai perubahan ke arah yang lebih baik lagi dari sebelumnya dan agar suatu kelompok masyarakat yang telah diperdayakan mempunyai pengetahuan, keterampilan dan dapat berdaya untuk memenuhi segala bentuk kebutuhan hidupnya.

2. Tahap – Tahap Pemberdayaan

Dalam pelaksanaannya pemberdayaan melalui beberapa tahap.

Tahap – tahap pemberdayaan menurut Sulistyanti (2004:83) yang harus dilalui dalam melakukan pemberdayaan adalah sebagai berikut :

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku sadar dan peduli sehingga merasa menumbuhkan peningkatan kapasitas diri. Pada tahap ini pihak pemberdaya berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif.
- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan – keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.
- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan – keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Sedangkan menurut Prijono dan Pranarka (1996) yang dikutip oleh Nasirin dan Alamsyah (2010 : 101) menyatakan ada tiga proses dalam tahap pemberdayaan masyarakat, antara lain tahap inisial, tahap partisipatoris, dan tahap emansipatif. Penjelasan nya adalah sebagai berikut :

- a. Tahap Inisial, dimana pemberdayaan pada tahap ini berasal dari pemerintah, oleh pemerintah dan untuk rakyat;
- b. Tahap partisipatoris, dimana pemberdayaan berasal dari pemerintah bersama masyarakat, untuk rakyat;
- c. Tahap Emansipatif, dimana pemberdayaan berasal dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, dan didukung oleh pemerintah bersama masyarakat.

Berdasarkan beberapa penjelasan tentang tahap – tahap pemberdayaan tersebut, maka peneliti berpendapat tahap – tahap pemberdayaan dapat melalui beberapa tahap, antara lain :

- a. Pengorganisasian Masyarakat

Bidang ini berkenaan dengan peningkatan partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan secara efektif melalui pengorganisasian. Masyarakat dapat diorganisasikan ke dalam beberapa bentuk, seperti organisasi kewilayahan yang luas, organisasi sektoral dan jaringannya atau aliansi dan koalisi. Organisasi-organisasi ini merupakan alat masyarakat untuk menyatakan kehendak mereka dan untuk mempengaruhi proses perubahan yang diinginkan.

- b. Penguatan Kelembagaan

Kegiatan ini pada dasarnya merupakan penguatan kemampuan organisasi yang telah ada dengan meningkatkan unsur : pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang ada termasuk didalamnya proses perguliran, manajemen, kemandirian kelompok, norma, dan nilai yang

dianut organisasi agar kegiatan kolektif menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam penerapannya penguatan kelembagaan banyak dilakukan melalui pelatihan, keterampilan dan studi banding. Keterampilan dalam hal ini mencakup latihan kepemimpinan, penerapan organisasi dan manajemen keuangan, studi banding dilakukan untuk melihat kelompok di tempat lain yang telah berhasil meningkatkan produktivitas kerja organisasi.

c. Manajemen Sumber Daya

Kegiatan ini untuk menjamin bahwa kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan apabila mereka mampu mengelola sumber daya dengan baik, termasuk didalamnya adalah kegiatan-kegiatan pengembangan organisasi sosial yang dapat melakukan fungsi pelayanan sosial, seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, transportasi, dan kegiatan lain yang dianggap perlu. Di samping itu organisasi ekonomi diperlukan untuk memformulasikan berbagai kegiatan ekonomi yang ada menjadi lebih beragam dan luas sehingga dapat memperluas lapangan kerja. Kegiatan konservasi dan rehabilitas lingkungan demi terciptanya pembangunan ekologi dan ekosistem juga menjadi perhatian.

3. Strategi Pemberdayaan

Strategi Pemberdayaan menurut para ahli yaitu salah satunya Kartasmita (1996) yang dikutip oleh Nasirin dan Alamsyah (2010:89) menyebutkan ada dua strategi di dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat, yaitu :

- a. Memberi peluang agar sector ekonomi dan masyarakat modern dapat tetap maju, karena kemajuan dibutuhkan untuk pembangunan bangsa secara keseluruhan.
- b. Memberdayakan sektor ekonomi dan lapisan rakyat yang masih tertinggal dan hidup di luar pinggiran jalur kehidupan modern yang dapat melalui, 1.) menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan, 2.) memperkuat daya atau potensi yang dimiliki oleh masyarakat melalui pemberian input berupa bantuan dana, pembangunan secara fisik dan social, 3.) pengembangan lembaga pendanaan, penelitian dan pemasaran daerah.

Sedangkan strategi pemberdayaan lain, menurut Suryono (2010:262 – 263) menyatakan ada empat strategi dalam memberdayakan masyarakat, sebagai berikut :

- a. Memberdayakan masyarakat dengan mensosialisasikan peran masyarakat sebagai subyek;
- b. Mendayagunakan mekanisme penyelenggaraan pembangunan atau pemberdayaan masyarakat secara aspiratif, demokratis, efektif, dan efisien;
- c. Mobilisasi sumberdaya manusia seperti tenaga, pikiran dan kemampuan sesuai dengan profesionalismenya;
- d. Memaksimalkan peran pemerintah.

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut tentang strategi pemberdayaan, maka peneliti berpendapat strategi pemberdayaan dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. Strategi pemberdayaan melalui bimbingan dengan tujuan membimbing atau melatih masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan.
- b. Strategi pemberdayaan melalui kelompok, media intervensi, tujuan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menghadapi permasalahan.

4. Pendekatan Pemberdayaan

Pendekatan pemberdayaan menurut Suharto (2009:67) proses pencapaian suatu tujuan pemberdayaan dapat dicapai melalui macam aspek. Diantaranya adalah melalui pendekatan pemberdayaan yang bisa disingkat 5P, antara lain :

- a. Pemungkinan
Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat – sekat kultural dan struktural yang menghambat;
- b. Penguatan
Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan – kebutuhannya. Pemberdayaan harus menumbuhkan kembangkan segenap

kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka;

- c. Perlindungan
Melindungi masyarakat terutama kelompok – kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil;
- d. Penyokongan
Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil;
- e. Pemeliharaan
Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap menjadi kesinambungan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan.

Sedangkan pendekatan pemberdayaan menurut Cook dan Macaulay (1997) yang dikutip oleh Nasirin dan Alamsyah (2010:95–97) menjelaskan delapan langkah yang utama yang harus dilakukan menuju pemberdayaan agar berhasil, antara lain sebagai berikut :

- a. Hubungan pemberdayaan dengan visi dan nilai
Jika pemberdayaan tidak dipandang sebagai tiang penyangga visi organisasi, maka masyarakat akan memandangnya sebagai tindakan iseng atau kehilangan konteksnya sejak awal. Pemberdayaan harus menjadi bagian awal dari nilai kemasyarakatan, sehingga dianggap sebagai salah satu faktor keberhasilan;
- b. Diarahkan dengan menggunakan contoh – contoh
Para pemimpin dapat memberikan visi untuk masa mendatang dan memberikan dukungan serta dorongan yang sangat penting untuk menciptakan suatu lingkungan dimana orang – orang bertanggung jawab terhadap nasib mereka;
- c. Berkomunikasi secara aktif

Dengan cara melibatkan masyarakat di dalam komunikasi dan pembahasan umpan balik secara tetap, maka akan mendorong terjadinya pemberdayaan;

d. Meninjau struktur organisasi

Pemberdayaan yang berhasil memerlukan perubahan yang terjadi di dalam struktur, sehingga para individu menjadi lebih dekat kepada titik keputusan, dan birokrasi dapat dibuang melalui rantai pengawasan yang lebih kecil;

e. Memperkuat tim kerja

Pemberdayaan membutuhkan dukungan. Kerja tim yang memiliki pemberdayaan adalah salah satu mekanisme terkuat untuk menyediakan suatu lingkungan bagi pengambilan inisiatif dan kadang – kadang berbuat kesalahan, tetapi juga untuk belajar darinya;

f. Mendorong pengembangan pribadi

Orang memerlukan bantuan dan dorongan untuk membentuk rasa percaya diri mereka di dalam membuat suatu keputusan sendiri, hal ini berarti bukan saja memberikan pelatihan kepada orang – orang tersebut untuk berperan lebih banyak tetapi juga untuk mendemonstrasikan rasa percaya dan rasa hormat kepada individu tersebut;

g. Menjadikan jasa layanan kepada pelanggan sebagai fokus

Hasil akhir ini pemberdayaan sering kali berupa naiknya tingkatan jasa layanan kepada pelanggan. Oleh karena itu, karyawan garis depan dan karyawan yang berhubungan dengan pelanggan internal harus di dorong untuk bertanggungjawab memuaskan pelanggan mereka;

h. Ukur pengembangan yang terjadi dan kenali serta hargailah keberhasilan. Sebelum memulai pemberdayaan, suatu organisasi perlu menentukan ukuran keberhasilan dan membantu agar ukuran ini dapat dipahami dan disepakati oleh setiap orang.

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, maka peneliti berpendapat bahwa pendekatan pemberdayaan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pemberdayaan adalah sebuah proses kolaboratif

b. Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor subjek yang berkompeten

- c. Kompetisi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup dan solusi-solusi yang berasal dari situasi khusus
- d. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan
- e. Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber secara efektif dan efisien. proses pembinaan bersifat dinamis, sinergis, evolutif.

5. Model – Model Pemberdayaan

Pemberdayaan memiliki beberapa model, model pemberdayaan yang dikemukakan oleh Suryono (2010:264), yaitu model pemberdayaan masyarakat adalah suatu alternatif, pola acuan, macam – macam upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian seseorang atau suatu lembaga, sehingga nantinya mampu mengembangkan kemampuannya secara optimal.

Ada beberapa macam model pemberdayaan, antara lain sebagai berikut :

- a. Model *People Centre Development*
Model pembangunan kualitas manusia adalah upaya meningkatkan kapasitas manusia untuk mempengaruhi dan mengatur masa depannya. Model ini mencoba mengangkat martabat manusia sebagai mana mestinya sebagai makhluk yang memiliki harga diri, memiliki kemampuan intelegensi dan sekaligus memiliki perasaan. Manusia tidak dapat disamakan dengan alat produksi untuk melipatgandakan hasil semata, melainkan manusia hendaknya dihargai dan dihormati, dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusianya sehingga akan menempatkan manusia pada martabat yang lebih baik dan layak.
- b. Model Lingkaran Setan kemiskinan

Asumsi dasar dari model ini adalah “a poor country is poor because it is poor” (negara miskin itu karena dia memang miskin). Kemiskinan itu merupakan lingkaran yang disebutnya dengan lingkaran kemiskinan yang mengemukakan bahwa kemiskinan diawali dengan adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar dan kurangnya modal yang menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan.

c. Model Kemitraan

Kemitraan dilihat dari kata etimologis diadaptasi dari kata *partnership* dan berasal dari akar kata *partner*. Kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling menumbuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu sehingga memperoleh hasil yang lebih baik. Tujuan kemitraan adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan saling memberikan manfaat antar pihak yang bermitra.

d. Model *Garmeen Bank*

Model ini berasal dari contoh pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Bangladesh *Garmeen Bank* yang memberikan pelayanan program pengentasan kemiskinan pada masyarakat. *Garmeen Bank* memberikan kredit kepada masyarakat tanpa agunan dan menciptakan sistem perbankan yang berbasis pada saling kepercayaan, akuntabilitas, partisipasi dan kreativitas.

e. Model Sri Mahila Sewa Sahakari Bank

Model ini diterapkan oleh Sri Mahila Sewa Bank sebagai lembaga keuangan yang memberikan akses keuangan terhadap wanita – wanita yang lemah dan miskin. Peminjaman hanya dilakukan untuk kegiatan ekonomi bukan untuk keperluan pribadi. Bank memperkerjakan dan mendorong dengan menabung melalui bank tersebut.

f. Model Sistem tanggung renteng

Model ini pada umumnya banyak diadopsi oleh para pengelola koperasi di Indonesia, khususnya pengelola koperasi simpan pinjam yang pada dasarnya merupakan upaya penguatan kelompok dalam berinteraksi antar manusia atau antar para anggota. Dengan menggunakan prinsip – prinsip, yaitu : sistem tanggung renteng

merupakan upaya memperbaiki kualitas manusia melalui interaksi antar manusia dalam kelompok menuju manusia yang berkualitas, kelompok tanggung renteng mengembangkan nilai – nilai umum dan khusus yang sesuai dengan nilai – nilai yang dimiliki koperasi.

C. Usaha Kecil dan Menengah

1. Pengertian Usaha Kecil dan Menengah

Pengertian usaha kecil dan menengah yang dijelaskan menurut para ahli, salah satunya yaitu M.Tohar (1999:2), maka pengertian usaha kecil dan menengah dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain :

a. Berdasarkan Total Asset

Berdasarkan total asset, pengusaha kecil adalah pengusaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat membuka usaha.

b. Berdasarkan Total Penjualan Bersih Per Tahun

Berdasarkan hal ini pengusaha kecil adalah pengusaha yang memiliki hasil total penjualan bersih per tahun paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

c. Berdasarkan Status Kepemilikan

Dari segi ini, didefinisikan bahwa pengusaha kecil adalah usaha berbentuk perseorangan, bisa berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang didalamnya termasuk koperasi.

Sedangkan pengertian lain usaha kecil dan menengah berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan pengertian usaha kecil dan menengah membagi kedalam dua pengertian yakni :

- a. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang – undang ini.
- b. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung

maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang – undang ini.

Berdasarkan yang sudah dijelaskan mengenai pengertian usaha kecil dan menengah tersebut, maka pengertian usaha kecil dan menengah dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha kecil dan menengah adalah sebuah perusahaan baik berbadan hukum maupun tidak, yang memiliki total penjualan maksimal 1 milyar/tahun.

2. Kriteria Usaha Kecil dan Menengah

Kriteria usaha kecil dan menengah yang dijelaskan menurut para ahli yaitu Susanta (2009:15), maka kriteria usaha kecil dan menengah dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Usaha yang berdiri sendiri, bukan perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik secara langsung dengan usaha menengah atau skala besar.
- b. Berbentuk usaha yang dimiliki orang perorang, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.

Sedangkan kriteria usaha menengah dijelaskan bahwa usaha yang orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.

Kriteria usaha kecil dan menengah berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pasal 6, criteria yang harus dimiliki oleh masing – masing usaha kecil dan menengah adalah sebagai berikut :

a. Kriteria usaha Kecil adalah sebagai berikut :

- Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

b. Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut :

- Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

3. Masalah Yang Dihadapi Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan yang dihadapi usaha kecil dan menengah menurut Primiana (2009:19-21) bahwa ada beberapa masalah yang dihadapi usaha kecil dan menengah diantaranya masalah permodalan, pemasaran, bahan baku, teknologi, manajemen, birokrasi dan kemitraan. Adapun masalah – masalah usaha kecil dan menengah diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Permodalan
 - a. Kurangnya akses ke Bank, lembaga kredit atau sumber pembiayaan lainnya
 - b. Prosedur pembelian kredit yang terlalu berbelit – belit, lama dan suku bunga yang tinggi
 - c. Bank kurang memahami kriteria usaha kecil dan menengah sehingga kredit yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan
 - d. Kurang mempunya komunitas usaha kecil dan menengah dalam membuat standar proposal yang baik dan benar
 - e. Kurangnya pembinaan tentang manajemen keuangan seperti perencanaan, pencatatan dan pelaporan

- f. Kredit yang diperlukan usaha kecil dan menengah tidak jelas atau tidak diketahui oleh pengusaha
- 2) Pemasaran
- a. Akses terhadap informasi pasar kurang
 - b. Terbatasnya tempat pemasaran
 - c. Kesulitan mencari agen atau pembukaan outlet, terutama di luar negeri
 - d. Kuatnya persaingan pasar dan produk
 - e. Kurangnya manajemen pemasaran
 - f. Kemampuan negosiasi yang lemah, sehingga berakibat kerugian pada sistem pembayaran dan perjanjian kontrak
 - g. Mahalnya sewa sarana tempat dan tempat penjualan
 - h. Kurang kerjasama dengan perusahaan besar, sesama usaha kecil dan menengah, pihak luar negeri terutama dalam hal promosi
 - i. Kelembagaan pendukung tidak berfungsi untuk membantu promosi
 - j. Penjiplaan/ pemalsuan produk
- 3) Bahan Baku
- a. Harga baku yang mahal dan berfluktuasi akibat borongan oleh pedagang besar yang mampu mengontrol bunga
 - b. Ekspor/ impor yang berlebihan berakibat pada fluktuasi harga bahan baku
 - c. Bahan baku yang dibutuhkan tidak diproduksi lagi
 - d. Kesulitan penyimpanan
 - e. Pengiriman tidak tepat waktu
 - f. Prosedur impor bahan baku yang tidak jelas
 - g. Lokasi sumber bahan baku yang jauh
 - h. Terbatasnya liveransir bahan baku
 - i. Kurang Informasi tentang sumber bahan baku
 - j. Kurang kerjasama dengan pengusaha besar dalam pengadaan bahan baku
- 4) Teknologi
- a. Kurangnya pelatihan untuk teknologi baru atau tepat guna
 - b. Kurang terampil dan rendahnya pendidikan dalam menggunakan teknologi baru
 - c. Kurang informasi tentang teknologi baru atau tepat guna yang sesuai kebutuhan
 - d. Mahalnya pemeliharaan
 - e. Harga yang mahal
 - f. Mutu yang rendah

- g. Sistem perijinan dan pencemaran
 - h. Kurangnya penelitian tentang teknologi yang sesuai dengan kebutuhan usaha kecil dan menengah
 - i. Tidak mampunya mempertahankan tenaga yang terampil
- 5) Manajemen
- a. Tidak ada pembagian kerja yang jelas
 - b. Kuatnya pengaruh perseorangan
 - c. Tercampurnya antara keuangan perusahaan dengan keluarga
 - d. Kurang mampu mengadakan perencanaan, pencatatan dan pelaporan
 - e. Asosiasi yang tidak berfungsi sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat, tidak ada jaringan pemasaran, tidak ada pelayanan dari pemerintah
 - f. Manajer kurang mampu merancang strategi bisnis
 - g. Rendahnya produktivitas pekerja
- 6) Birokrasi
- a. Kurang informasi tentang ijin yang dimiliki, prosedur pengurusan, sistem pembayaran, prosedur pengurusan, waktu yang lama dan berbelit – belitnya pengurusan
 - b. Pelayanan birokrasi yang kurang sesuai dengan kebutuhan
 - c. Pungutan yang tidak jelas
 - d. Adanya monopoli
 - e. Ketidakberpihakan pemerintah kepada usaha kecil dan menengah
 - f. Adanya kuota ekspor
- 7) Infrastruktur
- a. Tarif mahal
 - b. Pelayanan kurang
 - c. kualitas atau kuantitas kurang
- 8) Kemitraan
- a. Sistem pemasaran bersama yang banyak merugikan usaha kecil dan menengah
 - b. Sistem pembayaran yang merugikan
 - c. Kurangnya transfer teknologi

Sedangkan permasalahan yang dihadapi usaha kecil dan menengah menurut Tambunan (2002 : 73), antara lain :

a. Kesulitan pemasaran

Hasil dari studi lintas Negara yang dilakukan oleh James dan Akarasee (1988) di sejumlah Negara ASEAN menyimpulkan salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran yang umum dihadapi oleh pengusaha UKM adalah tekanan-tekanan persaingan, baik dipasar domestik dari produk-produk yang serupa buatan pengusaha-pengusaha besar dan impor, maupun dipasar ekspor.

b. Keterbatasan finansial

Usaha kecil dan menengah di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek finansial antara lain: modal (baik modal awal maupun modal kerja) dan finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan output jangka panjang.

c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan sumber daya manusia juga merupakan salah satu kendala serius bagi UKM di Indonesia, terutama dalam aspek-aspek kewirausahaan, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, control kualitas, akuntansi, mesin-mesin, organisasi, pemrosesan data, teknik pemasaran, dan penelitian pasar. Semua keahlian tersebut sangat diperlukan untuk mempertahankan atau memperbaiki kualitas produk, meningkatkan efisiensi dan produktifitas dalam produksi, memperluas pangsa pasar dan menembus pasar baru.

d. Masalah bahan baku

Keterbatasan bahan baku dan input-input lain juga sering menjadi salah satu masalah serius bagi pertumbuhan output atau kelangsungan produksi bagi UKM di Indonesia. Terutama selama masa krisis, banyak sentra-sentra usaha kecil dan menengah seperti sepatu dan produk-produk textile mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku atau input lain karena harganya dalam rupiah menjadi sangat mahal akibat depresiasi nilai tukar terhadap dolar AS.

e. Keterbatasan teknologi

Berbeda dengan Negara-negara maju, UKM di Indonesia umumnya masih menggunakan teknologi tradisonal dalam bentuk mesin-mesin tua atau alat-alat produksi yang sifatnya manual. Keterbelakangan teknologi ini tidak hanya membuat rendahnya jumlah produksi dan efisiensi di dalam proses produksi, tetapi juga rendahnya kualitas produk yang dibuat serta kesanggupan bagi UKM di Indonesia untuk dapat bersaing di pasar global. Keterbatasan teknologi disebabkan oleh banyak faktor seperti keterbatasan modal investasi untuk membeli mesin-mesin baru, keterbatasan informasi

mengenai perkembangan teknologi, dan keterbatasan sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan mesin-mesin baru.

Berdasarkan penjabaran permasalahan yang dihadapi oleh usaha kecil dan menengah yang sudah dijelaskan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha kecil dan menengah mengalami permasalahan permodalan, pemasaran, sumberdaya manusia, bahan baku, teknologi, manajemen, birokrasi, dan infrastruktur.

4. Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah

Usaha kecil dan menengah memiliki peranan yang penting di dalam membantu perekonomian suatu negara serta masyarakatnya, oleh karena itu dibutuhkan strategi untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah. Strategi yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah salah satunya adalah memberdayakan sumberdaya manusia dan memberikan pembinaan yang terkait dengan usaha kecil dan menengah.

Menurut Hafsah (2004:43) dalam pengembangan usaha kecil dan menengah merupakan suatu tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mencermati masalah yang dihadapi usaha kecil dan menengah, maka diperlukan upaya dalam pengembangan usaha kecil dan menengah, antara lain sebagai berikut :

1. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif

Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketentraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perijinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya.

2. Bantuan Permodalan

Pemerintahan perlu memperluas skim kredit khusus dengan syarat – syarat yang tidak memberatkan bagi usaha kecil dan menengah, untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial formal, sektor jasa permodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial formal, sektor jasa finansial informal, skema penjaminan, leasing dan dana modal ventura.

3. Perlindungan Usaha

Jenis – jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undang – undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan.

4. Pengembangan Kemitraan

Perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antara usaha kecil dan menengah, atau antara usaha kecil dan menengah dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk terjadinya monopoli dalam usaha. Di samping itu juga untuk memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian usaha kecil dan menengah akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri.

5. Pelatihan

Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi usaha kecil dan menengah baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasidan pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan usahany.

6. Membentuk Lembaga Khusus

Perlu dibangun suatu lembaga yang khusus bertanggung jawab dalam mengkoordinasi semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penumbuhkembangan usaha kecil dan menengah dan juga berfungsi untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi permasalahan baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh usaha kecil dan menengah.

7. Memantapkan Asosiasi

Asosiasi yang telah ada perlu diperkuat, untuk meningkatkan perannya antara lain dalam pengembangan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha bagi anggotanya.

8. Mengembangkan Promosi

Guna lebih mempercepat proses kemitraan antara usaha kecil dan menengah dengan usaha besar diperlukan media khusus dalam upaya mempromosikan produk – produk yang dihasilkan. Disamping itu perlu juga diadakan talk show antara asosiasi dengan mitra usahanya.

9. Mengembangkan Kerjasama Setara

Perlu adanya kerjasama atau koordinasi yang sesuai antara pemerintah dengan dunia usaha untuk menginventarisir berbagai isu – isu mutakhir yang terkait dengan pengembangan usaha.

Sedangkan menurut Primiana (2009:34) menyatakan bahwa dalam pengembangan usaha kecil dan menengah yang dilakukan adalah membentuk badan atau pusat kerjasama antar lembaga atau instansi yang memudahkan bagi usaha kecil dan menengah mencari pendamping baik dari sisi manajerial maupun pendanaan. Pada badan atau pusat ini akan ada pembagian tugas, sehingga lembaga atau instansi akan berbagi peran, siapa yang bertugas melakukan seleksi, melakukan pembinaan dan pengembangan serta pendanaan. Artinya disini, usaha kecil dan menengah tidak perlu lagi mencari kredit ke perbankan atau lembaga keuangan non bank yang sampai saat ini masalahnya tidak selesai – selesai. Seluruh tahapan ini menjadi satu atap sehingga memudahkan bagi pemerintah untuk melakukan monitoring kemajuan dari pemberdayaan usaha kecil dan menengah.

Dengan melihat strategi pengembangan usaha kecil dan menengah yang sudah dijelaskan tersebut, maka peneliti berpendapat bahwa strategi pengembangan usaha kecil dan menengah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Kemudahan dalam Akses Permodalan

Usaha kecil dan menengah perlu mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan modal untuk usahanya agar usaha kecil dan menengah dapat tetap ada sebagai salah satu penopang perekonomian negara.

b. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan aktor penggerak usaha kecil dan menengah sehingga mutu sumber daya manusia perlu ditingkatkan melalui pembinaan dan pelatihan sumber daya manusia agar usaha kecil dan menengah dapat berkembang dan maju.

c. Pengembangan Jaringan Usaha, Pemasaran dan Kemitraan Usaha

Penentu baik tidaknya produktifitas dari usaha kecil dan menengah adalah bagaimana gambaran skala jaringan usaha, pemasaran, dan kemitraan usahanya sehingga hal tersebut perlu diperhatikan dengan menciptakan skala usaha yang luas sehingga tingkat produktifitas usaha kecil dan menengah sesuai dengan yang diharapkan.

d. Bantuan Pembangunan Prasarana

Prasarana merupakan faktor penunjang terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha kecil dan menengah sehingga prasarana perlu ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan usaha kecil dan menengah.

e. Peningkatan Akses Teknologi

Teknologi merupakan penentu keberhasilan usaha di negara – negara maju oleh karena itu perlu memotivasi lembaga penelitian teknologi untuk menciptakan teknologi yang berorientasi pada usaha kecil dan menengah.

f. Mewujudkan Iklim Bisnis yang Lebih Kondusif

Bukti iklim bisnis yang belum kondusif adalah rendahnya pelayanan publik, kurangnya kepastian hukum dan berbagai peraturan daerah yang tidak pro bisnis oleh karena itu perlu perbaikan iklim bisnis yang lebih kondusif dengan melakukan reformasi atau deregulasi perijinan bagi usaha kecil dan menengah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah untuk mengungkap suatu permasalahan tertentu dimana dalam menjalankan penelitian menggunakan metode tertentu yang membantu dan mempermudah peneliti untuk dapat memahami permasalahan yang akan diteliti. Menurut Nazir (2003:14) Penelitian adalah suatu penyelidikan yang terorganisasi. Penelitian dapat digunakan sebagai pencari pengetahuan dan pemberian arti secara terus-menerus terhadap sesuatu. Penelitian juga merupakan suatu percobaan yang hati-hati dan kritis untuk menemukan sesuatu yang baru. Dalam melaksanakan suatu penelitian diperlukan suatu metode penelitian yang disesuaikan berdasarkan pokok permasalahan yang akan diteliti. Dengan menggunakan metode yang tepat maka akan didapat suatu data atau informasi yang dapat mendukung penelitian sehingga ruang lingkup penelitian akan lebih jelas dan terfokus.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Nazir (2003:54) Penelitian dengan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu sel kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Pendekatan kualitatif sendiri sengaja dipilih untuk memperoleh gambaran secara sistematis dan faktual terhadap fenomena dan permasalahan yang terjadi, dimana dalam penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena upaya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam pemberdayaan usaha kecil, dan menengah di Kabupaten Probolinggo.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif diperlukan suatu fokus penelitian. Fokus penelitian sendiri merupakan penetapan hal-hal yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian. Menurut Moleong (2001:237) Fokus penelitian dalam sebuah penelitian kualitatif berfungsi untuk:

1. Membatasi studi atau dengan kata lain fokus penelitian dapat membatasi bidang *inquiri* (masukan), misalnya jika peneliti membatasi diri pada upaya menemukan teori-teori dasar, maka lapangan penelitian lainnya tidak dimanfaatkan lagi;
2. Memenuhi kriteria *inquiri-eksekusi* (masukan dan pengeluaran) suatu informasi yang diperoleh dari lapangan. Dengan adanya fokus penelitian seorang peneliti dapat mengetahui data mana yang perlu diambil dari data-data yang sedang dikumpulkan.

Disanalah letak pentingnya fokus penelitian, sehingga peneliti kualitatif harus menetapkan fokus atau batasan karena didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi, dana dan waktu dari proses penelitian itu sendiri. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

- 1) Upaya pemberdayaan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo terhadap usaha kecil, dan menengah di Kabupaten Probolinggo
 1. Peningkatan mutu sumber daya manusia
 2. Pameran produk usaha kecil dan menengah
 3. Bantuan akses pemodalan

- 2) Faktor pendukung dan penghambat Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo dalam pemberdayaan usaha kecil, dan menengah di Kabupaten Probolinggo

2.1 Faktor Pendukung

1. Peningkatan mutu sumber daya manusia
 - a. Adanya dukungan dari pemerintah
 - b. Adanya partisipasi dari masyarakat
2. Pameran produk usaha kecil dan menengah
 - a. Adanya dukungan dari pemerintah
3. Bantuan akses pemodalan
 - a. Adanya dukungan dari pemerintah

2.2 Faktor Penghambat

1. Peningkatan mutu sumber daya manusia
 - a. Keterbatasan jumlah tenaga ahli
 - b. Keterbatasan anggaran
2. Pameran produk usaha kecil dan menengah
 - a. Pelaku usaha kecil dan menengah sering beralih produk
3. Bantuan akses pemodalan
 - a. Pelaku usaha kecil dan menengah kurang responsif

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah keseluruhan ruang dimana suatu peristiwa dan fenomena ditangkap. Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo. Alasan peneliti memilih Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo sebagai lokasi penelitian karena Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo merupakan lembaga pemerintah yang berwenang dan bertanggung jawab dalam mengupayakan pemberdayaan dan mengatasi permasalahan – permasalahan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Probolinggo.

Situs Penelitian merupakan letak sebenarnya dimana peneliti mengadakan penelitian untuk mendapatkan data yang valid, akurat serta benar - benar diperlukan dalam penelitian. Situs penelitian adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo. Untuk mendapatkan data – data penelitian, yaitu melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo.

D. Sumber Data

Sumber data menurut Moleong (2001:157) dalam penelitian kualitatif adalah: “Kata-kata, tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti

dokumen dan lain-lain”. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data adalah narasumber yang telah dianggap menguasai bidang permasalahan dan berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan.

E. Jenis Data

Jenis data menurut Moleong (2001:157) dalam penelitian kualitatif, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data skunder, sebagai berikut :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung pada saat melakukan penelitian, sumber data merupakan informan atau responden yang dipilih untuk memperoleh data-data atau informasi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Sumber data dari penelitian ini adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo.
2. Data skunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat memperkuat dan mendukung data primer. Data skunder yang digunakan dalam penelitian ini sendiri berupa dokumen-dokumem, catatan-catatan, arsip-arsip, serta sumber-sumber lainya yang berkaitan dengan tema dalam penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participan observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi (Sugiyono:2011). Dalam penelitian ini sendiri, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Esterberg (dalam Sugiyono 2011) mendefinisikan *interview* sebagai berikut “*a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and join construction of meaning about a particular topic*”. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Sedangkan menurut Patton (dalam Poerwandari 1998) dalam proses wawancara dengan menggunakan pedoman umum wawancara ini, interview dilengkapi pedoman wawancara yang sangat umum, serta mencantumkan isu-isu yang harus diliput tanpa menentukan urutan pertanyaan, bahkan mungkin tidak terbentuk pertanyaan yang eksplisit. Pedoman wawancara digunakan

untuk mengingatkan *interviewer* mengenai aspek-aspek apa yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (*check list*) apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan. Dengan pedoman demikian interviwer harus memikirkan bagaimana pertanyaan tersebut akan dijabarkan secara kongkrit dalam kalimat tanya, sekaligus menyesuaikan pertanyaan dengan konteks actual saat wawancara berlangsung (Patton dalam poerwandari, 1998)

Berdasarkan hal tersebut, pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara yang disesuaikan dengan pemberdayaan yang akan dilakukan yaitu :

1. Bp. Bambang Supriadi selaku Kepala Bidang Bina Usaha Kecil, dan Menengah
2. Bp. Soegeng selaku Kepala Seksi Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan
3. Ibu Umu Fatima selaku Kepala Bidang Permodalan dan pengendalian.

2. Observasi

Disamping wawancara, penelitian ini juga melakukan metode observasi. Observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Observasi yang akan dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara. Menurut Patton (dalam Poerwandari, 1998) tujuan observasi adalah mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian di lihat dari perpektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati tersebut.

Menurut Patton (dalam Poerwandari 1998) salah satu hal yang penting, namun sering dilupakan dalam observasi adalah mengamati hal yang tidak terjadi. Dengan demikian Patton menyatakan bahwa hasil observasi menjadi data penting karena :

- a. Peneliti akan mendapatkan pemahaman lebih baik tentang konteks dalam hal yang diteliti akan atau terjadi.

- b. Observasi memungkinkan peneliti untuk bersikap terbuka, berorientasi pada penemuan dari pada pembuktiaan dan mempertahankan pilihan untuk mendekati masalah secara induktif.
- c. Observasi memungkinkan peneliti melihat hal-hal yang oleh subjek penelitian sendiri kurang disadari.
- d. Observasi memungkinkan peneliti memperoleh data tentang hal-hal yang karena berbagai sebab tidak diungkapkan oleh subjek penelitian secara terbuka dalam wawancara.
- e. Observasi memungkinkan peneliti merefleksikan dan bersikap introspektif terhadap penelitian yang dilakukan. Impresi dan perasan pengamatan akan menjadi bagian dari data yang pada gilirannya dapat dimanfaatkan untuk memahami fenomena yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*) ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2011:240). Dengan membaca dokumen dan mengadakan pencatatan-pencatatan melalui dokumentasi yang ada di wilayah penelitian, maka peneliti dapat mempertajam perasaan untuk meneliti serta memberikan analisis yang lebih akurat.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian merupakan alat yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian. Menurut Moleong (2001:117), “penelitian dengan metode kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta. Namun peranan penelitianlah yang sangat menentukan keseluruhan sekenarionya.” Artinya peneliti merupakan instrumen utama dalam pendekatan kualitatif ditunjang dengan pencatatan dokumen dan pencatatan sistematis. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah:

1. Peneliti sendiri, dimana pemana peneliti bertindak selaku instrumen yang mengamati dan mencatat peristiwa-peristiwa penting yang berlangsung serta berkaitan dengan obyek penelitian. Oleh karena itu data-data yang diperoleh dilapangan harus benar-benar dipahami peneliti.
2. Pedoman wawancara (*interview guide*), digunakan sebagai pedoman untuk mengarahkan atau mempermudah saat melakukan wawancara kepada narasumber atau informan sehingga tidak keluar dari permasalahan yang diteliti. Selain itu pedoman wawancara juga

berguna untuk membatasi dan mengarahkan peneliti dalam mencari data-data yang diperlukan guna kegiatan penelitian.

3. Perangkat Penunjang, sebagai alat bantu dalam memperoleh data seperti buku catatan, kamera digital, alat rekaman melalui handphone, dsb.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan mengolah data yang diperoleh dari pustaka dan lapangan menjadi seperangkat hasil, baik dalam bentuk penemuan baru maupun dalam bentuk kebenaran hipotesa. Menurut Nazir (2003:358), Analisis adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, manipulasi serta menyingkat data sehingga mudah untuk dibaca. Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang meliputi analisis-analisis berdasarkan obyek penelitian yang telah disusun sebelumnya sehingga penelitian ini dapat lebih terarah. Selain itu dalam penelitian kualitatif analisa data harus dilakukan sejak awal dan dituangkan dalam bentuk tulisan. Dalam tulisan ini, peneliti menggunakan rancangan analisa data menurut model interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hal ini dikarenakan sifat penelitian ini bersifat interaktif,

dimana peneliti melakukan penelitian dilapangan dan berinteraksi secara langsung dengan sumber informan. Dalam menganalisis data penelitian , peneliti mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Miles dan Hubberman (1992:20).

1. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan tiga teknik yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Hal tersebut dikarenakan data yang diinginkan peneliti berbeda dan tidak selalu dalam bentuk dokumen, namun juga dapat berupa pernyataan atau gambar. Untuk itulah diperlukan adanya kegiatan wawancara untuk mendapat informasi mendalam dari beberapa informan yang berhubungan dengan tema penelitian. Selain itu, dalam proses pengumpulan data peneliti juga melakukan berulang-ulang yang disesuaikan dengan kebutuhan data dan kejenuhan data khususnya yang berkaitan dengan rumusan masalah dan fokus dalam penelitian ini.

2. Reduksi Data

Proses selanjutnya setelah pengumpulan data adalah reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting kemudian mencari tema dan polanya. Dalam tahap ini, peneliti melakukan penelaahan terhadap semua data yang telah diperoleh dari berbagai sumber dan dengan berbagai metode yang telah dijelaskan

sebelumnya, kemudian reduksi data dilakukan dengan cara membuat tabelisasi dan abstraksi, yaitu membuat rangkuman dan tabelisasi dari masing-masing fokus yang telah ditetapkan. Dalam proses ini peneliti juga mengabaikan data dan informasi yang tidak sesuai dengan permasalahan, tujuan, dan fokus penelitian. Sehingga data-data yang tersaji merupakan data yang benar-benar berhubungan dengan judul dari penelitian itu sendiri.

3. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data atau menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini, Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2011) menyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*". Maksudnya dalam penelitian kualitatif yang paling sering digunakan dalam penyajian data adalah teks yang bersifat naratif.

Dalam penelitian ini sendiri, data yang diperoleh dari lokasi dan situs penelitian akan disajikan sesuai dengan format dan ketentuan dari Fakultas Ilmu Administrasi agar data tersebut dapat dipelajari oleh berbagai pihak. Penyajian data ini juga diikuti oleh analisis data, dimana data yang telah

direduksi intrestasikan oleh peneliti dan dihubungkan dengan fokus penelitian sehingga tersaji lapiran yang memiliki kekayaan informasi dan pengetahuan.

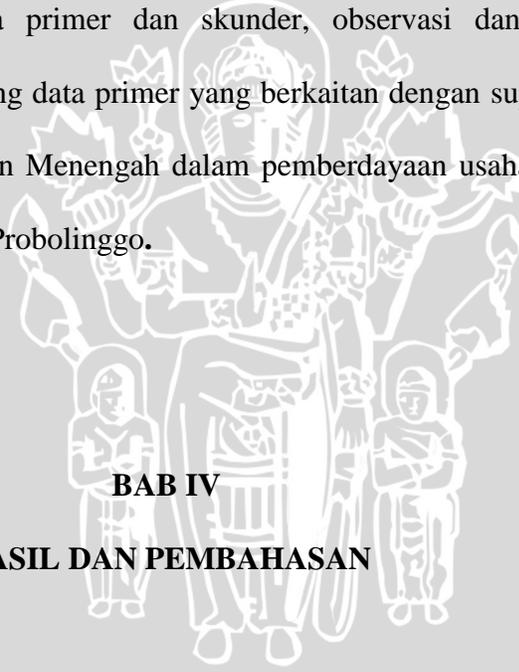
4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan hasil dari analisa data yang didasarkan pada berbagai teori terkait. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif sendiri merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang masih belum terlihat jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori yang selanjutnya diperoleh suatu kesimpulan.

I. Keabsahan Data

Dalam menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut, dan teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan pemeriksaan melalui sumber yang lainnya. Menurut Sugiono (2011:241), triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data

yang telah ada. Mathinson (dalam Sugiyono, 2011:241) menyatakan bahwa nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh *convergent* (meluas), tidak konsisten atau kontradiksi. Oleh karena itu dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten. Triangulasi dilakukan melalui wawancara, observasi langsung dan observasi tidak langsung. Teknik pengumpulan data yang digunakan akan melengkapi dalam memperoleh data primer dan skunder, observasi dan interview digunakan untuk menjaring data primer yang berkaitan dengan supaya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Probolinggo.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

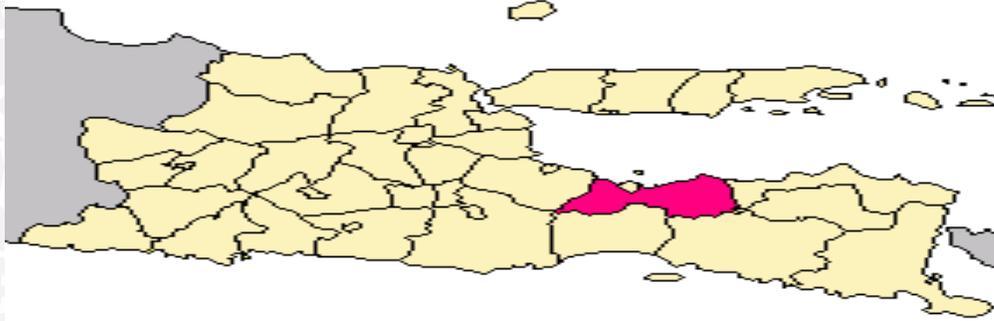
1. Gambaran Umum Kabupaten Probolinggo

a. Kondisi Geografis

Kabupaten Probolinggo adalah salah satu Kabupaten di Indonesia yang terletak di Propinsi Jawa Timur. Luas wilayahnya 1.696,17 km² dan jumlah penduduknya 1.095.370 jiwa (tahun 2010). Kabupaten Probolinggo dikelilingi oleh Gunung Semeru, Gunung Argopuro, dan Pegunungan Tengger pada 112° 51' - 113° 30' Bujur Timur dan 7° 40' - 8° 10' Lintang Selatan, berada pada ketinggian 0 - 2500 m dpl. Batas Kabupaten Probolinggo sebelah utara berbatasan dengan selat Madura, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Jember, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang. Kabupaten Probolinggo sendiri terdiri dari 24 Kecamatan, 5 Kelurahan, 328 Desa.

(www.kabprobolinggo.go.id)

Peta lokasi Kabupaten Probolinggo



Sumber:

<http://Probolinggo.kab.go.id/imgnews/peta%20kabupaten%20Probolinggo.jpg>

b. Keadaan Demografi

Wilayah Kabupaten Probolinggo adalah daerah pantai yang sangat Asri seperti Kecamatan Tongas, Sumberasih, Dringu, Pajarakan, Kraksaan, Paiton dan terdapat Wisata Pantai Pasir Putih dengan Panorama Ikan dan Trumbu Karang. Sedangkan daerah pegunungan berpotensi untuk pengembangan sektor perkebunan dengan berbagai komoditinya.

c. Potensi

Kabupaten Probolinggo mempunyai banyak objek wisata, di antaranya Gunung Bromo, air terjun Madakaripura, Pulau Giliketapang dengan taman lautnya, Pantai Bukit Bentar, Ranu Segaran, dan Sumber Air Panas yang terletak di Desa Tiris serta Candi Jabung yang mencerminkan kejayaan masa lalu. Selain itu Kabupaten Probolinggo memiliki bermacam-macam seni budaya khas, di antaranya Kerapan Sapi, Kuda Kencak, Tari Glipang dan Tari Slempong, Tari Pangore dan Seni Budaya masyarakat Tengger. Selain obyek wisata dan keseniannya Kabupaten Probolinggo juga menghasilkan buah-buahan, sayur-sayuran serta hasil perkebunan lainnya.

d. Hasil Bumi

Kabupaten Probolinggo memiliki Sumber Daya Alam berupa tembakau, mangga, anggur, semangka, gula, pohon jati, udang, pasir, emas, tembaga, mangaan, biji besi, belerang, sulfur, dan ikan laut.

e. Nilai Budaya

Selain itu Kabupaten Probolinggo memiliki bermacam-macam seni budaya khas, diantaranya Kerapan Sapi, Kuda Kencak, Tari Glipang dan Tari

Slempang, Tari pangore dan Seni Budaya masyarakat Tengger. Selain obyek wisata dan keseniannya Kabupaten Probolinggo juga menghasilkan buah-buahan, sayur-sayuran serta hasil perkebunan lainnya yang sangat berperan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, guna memenuhi pembiayaan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah.

2. Gambaran Umum Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo Adalah instansi milik pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo yang menangani koperasi, usaha kecil dan menengah di Kabupaten Probolinggo yang memiliki binaan meliputi : 710 koperasi yang terdiri dari 565 koperasi aktif dan 145 koperasi tidak aktif. Sedangkan data UKM yang masuk ke Dinas Koperasi UKM sebanyak 7400 UKM.

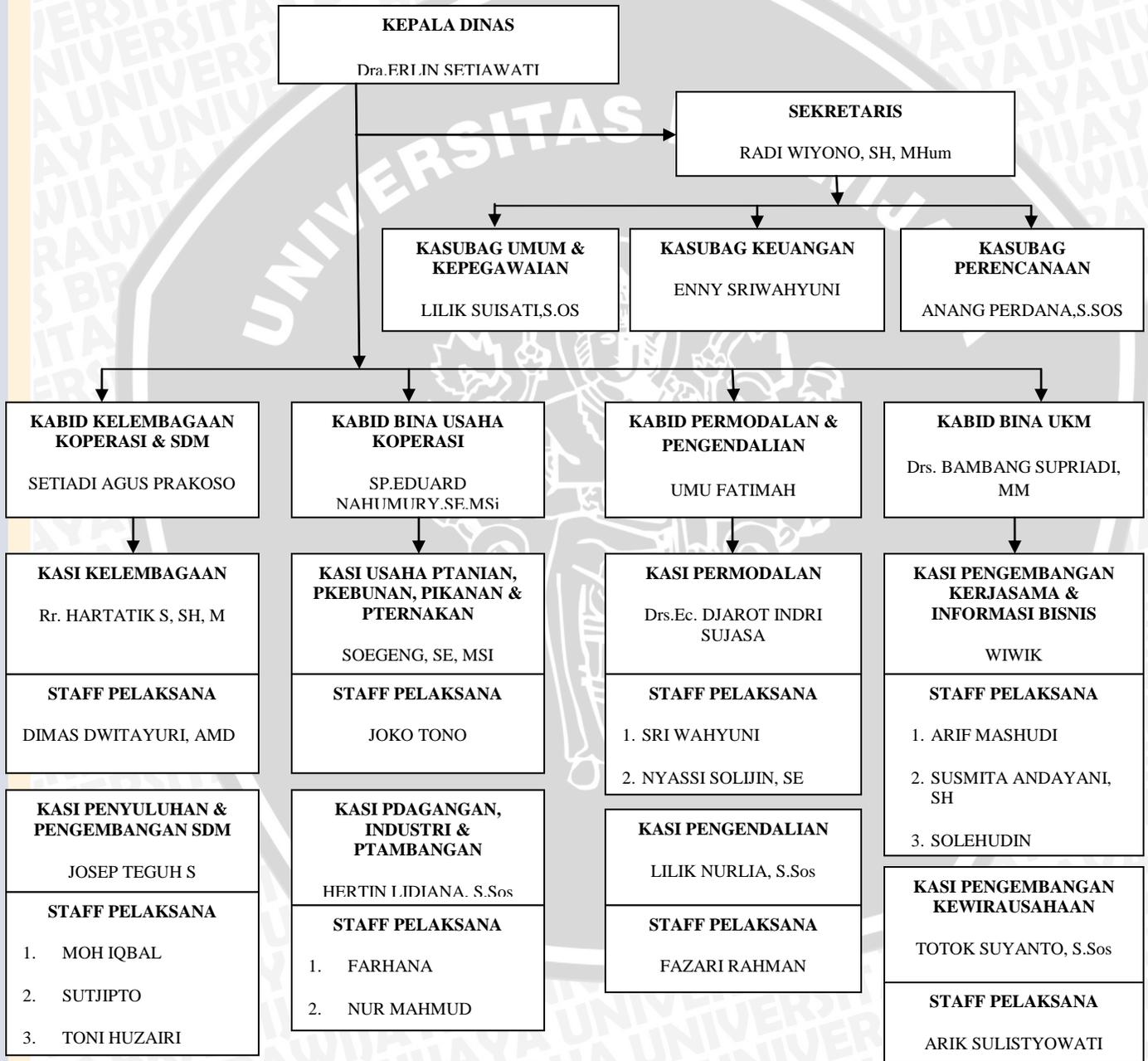
a. Struktur Organisasi

Dalam rangka melaksanakan mandat dan tugas pokok dilaksanakan fungsi dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo maka sesuai dengan peraturan Bupati Probolinggo Nomor : 15 Tahun 2008 tanggal 22 Januari 2008 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kabupaten Probolinggo maka disusunlah struktur organisasi yang dapat dilihat tentang struktur organisasi, sebagai berikut :

Gambar 1

Struktur Organisasi

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo



b. Visi dan Misi

a) Visi

Visi organisasi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang tangguh dan mandiri”

b) Penjelasan makna visi

Beberapa pengertian :

1. Koperasi adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang perekonomian yang bertumpu pada kekuatan anggotanya baik dalam usaha maupun permodalannya, bertujuan meningkatkan tingkat kesejahteraan khususnya dan masyarakat pada umumnya
2. Usaha kecil dan menengah adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang perekonomian dan bertumpu pada permodalan sendiri dengan skala terbatas dan kemampuan memperoleh pasar yang strategis
3. Tangguh dan mandiri adalah keinginan yang diharapkan bagi keberadaan koperasi, usaha kecil dan menengah mampu bersaing secara sehat dengan badan usaha lainnya, bertumpu pada kemandirian yang dimiliki.

c. Sasaran

Sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah :

1. Meningkatkan koperasi aktif
2. Meningkatkan tingkat volume usaha koperasi
3. Meningkatkan jumlah UKM yang dibina

d. Kebijakan

Kebijakan operasional yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Memantapkan kelembagaan dan SDM, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah
 - b. Mengembangkan daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah
 - c. Mengembangkan struktur permodalan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah
 - d. Menciptakan iklim usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah
- e. Program

Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut, maka program dalam pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang akan diimplementasikan dalam program pembangunan sebagai berikut :

- a) Program pelayanan administrasi perkantoran
- b) Program sarana dan prasarana aparatur pemerintah
- c) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- d) Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah
- e) Program peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi, usaha kecil dan menengah
- f) Program pengembangan industri kecil, menengah dan investasi

B. Penyajian Data

1. Upaya pemberdayaan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo terhadap usaha kecil, dan menengah di Kabupaten Probolinggo.

Jumlah Usaha Kecil dan Menengah yang ada di Kabupaten Probolinggo cukup banyak. Berdasarkan keterangan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo menyebutkan ada 7400 usaha kecil dan menengah yang tersebar di Kabupaten Probolinggo. Dengan melihat hal tersebut usaha kecil dan menengah di Kabupaten Probolinggo memiliki prospek ke depan yang baik karena Kabupaten Probolinggo merupakan daerah yang berada dalam kawasan wisata yang terkenal secara nasional maupun internasional sehingga akan mempengaruhi keberadaan usaha kecil dan menengah sehingga usaha kecil dan menengah di Kabupaten Probolinggo mempunyai potensi untuk dikembangkan. Produk usaha yang dihasilkan beraneka ragam mulai dari makanan, minuman dan kerajinan khas Probolinggo. Dengan melihat potensi tersebut usaha kecil dan menengah harus dikembangkan. Namun, usaha kecil dan menengah di Kabupaten Probolinggo mempunyai permasalahan yang harus dihadapi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa usaha kecil dan menengah di Kabupaten

Probolinggo memiliki permasalahan sumber daya manusia, pemasaran, dan permodalan. Dalam mengatasi permasalahan tersebut pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo melakukan upaya pemberdayaan terhadap usaha kecil dan menengah meliputi :

- Peningkatan mutu sumber daya manusia, pameran produk usaha kecil dan menengah serta bantuan akses permodalan, sebagai berikut :

1.1 Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting dalam upaya mengembangkan suatu usaha kecil dan menengah. Sebagian besar sumber daya manusia yang menggerakkan usaha kecil dan menengah masih rendah sehingga produk yang mereka hasilkan masih kalah saing dengan produk yang dihasilkan usaha besar. Salah satu faktor yang menjadi sebabnya adalah pendidikan dan pengetahuan yang masih rendah sehingga berpengaruh terhadap pengelolaan produk usahanya. Saat ini Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo berupaya melakukan pemberdayaan usaha kecil dan menengah di bidang sumber daya manusia. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Probolinggo memfokuskan pada kemampuan teknis yaitu bagaimana usaha kecil dan menengah dalam menghasilkan produk serta yang menyangkut dengan pengemasan produk karena hal tersebut yang dinilai masih kurang. Wujud

dari peningkatan mutu sumber daya manusia tersebut adalah akan dilaksanakan program pembinaan dan pelatihan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo.

Hal ini selaras dalam wawancara yang dilakukan dengan Bp. Soegeng selaku kepala seksi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan dalam wawancara, sebagai berikut :

“SDM dari usaha kecil dan menengah bisa dikatakan masih rendah mas, karena itu dipengaruhi oleh rendahnya pendidikan dan pengetahuan yang mereka miliki, sehingga berpengaruh terhadap produk yang dihasilkan. Produk mereka kurang berkualitas itu terletak pada pengemasan produknya mas sehingga tampilan produknya kurang menarik dan kurang diminati di pasaran.” (Wawancara Tanggal 22 September 2014, Pukul 10.00 WIB)

Pernyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan Bp. Bambang Supriadi selaku Kepala Bidang Bina Usaha Kecil dan Menengah, sebagai berikut :

“Saat ini kualitas SDM untuk UKM memang bisa dibilang kurang dan perlu ditingkatkan mas. Oleh karena itu, saat ini Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mengadakan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku UKM yang memprioritaskan pembinaan dan pelatihan pembuatan produk yang ingin dihasilkan UKM dengan mengundang narasumber, serta melakukan pembinaan dan pelatihan pengemasan produk. Karena dua permasalahan itu yang sering terjadi pada hampir di semua UKM di Kabupaten Probolinggo.” (Wawancara Tanggal 30 September 2014, Pukul 08.00 WIB)

Seperti yang dijelaskan sebelumnya kurangnya mutu sumber daya manusia terletak pada kemampuan dalam hal menghasilkan produk dan pengemasan produk. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo menyelenggarakan program pembinaan dan pelatihan, sebagai berikut :

- 1.1.1 Membekali pemahaman mengenai bagaimana mengelola manajemen usaha kecil dan menengah kepada pelaku usaha kecil dan menengah sehingga dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya.
- 1.1.2 Memberikan keterampilan kepada usaha kecil dan menengah dalam menghasilkan produk serta yang berkaitan dengan pengemasan produk.

Berikut ini adalah rincian pelaksanaan pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo tahun 2013, sebagai berikut :

Tabel 1. Pelaksanaan Pembinaan dan Pelatihan UKM Tahun 2013

Tanggal	Bentuk Pembinaan dan Pelatihan	Tempat	Jumlah UKM
25-2-2013	Pembuatan kerajinan kain perca atau keset	Hotel Sukapura Permai	30
09-04 2013	Pelatihan kerajinan batik	Hotel Sukapura	30

	tulis	Permai	
27-03-2013	Pelatihan manajemen usaha produktif cluster gerabah	Desa Sumurdalam Kec. Besuk	30
07-10-2013	Pelatihan usaha produktif cluster ayam buras	Desa Sumberkare Kec. Wonomerto	30
08-07-2013	Pelatihan pembuatan kerajinan bambu	Kec. Sumberasih	30
28-01-2013	Pelatihan olahan bawang	Balai Desa Tegalrejo Kec. Dringu	30
12-06-2013	Pelatihan olahan hasil laut	Gedung KKB - Tongas	30
04-03-2013	Pelatihan kerajinan jilbab dan accesoris	Kecamatan Sukapura	30
23-04-2013	Pelatihan pembuatan keset dari kain perca	Desa Sepuhgembol Kec. Wonomerto	30
04-07-2013	Pelatihan pembuatan kain perca	Desa Semampir Kec. Kraksaan	30

30-05-2013	Pelatihan kerajinan jilbab dan aksesoris	Desa Pendopo Kec. Sumber	30
14-02-2013	Pelatihan kerajinan jilbab dan aksesoris	Kec. Lumbang	30
11-09-2013	Pelatihan pembuatan keset kain perca	Gedung KKB - Tongas	30
23-09-2013	Pelatihan manajemen dan praktek pengelolaan sampah	Pendopo Kel. Sidomantu	30
18-11-2013	Pelatihan lukis kain	Gedung KKB - Tongas	30

Sumber : *Bagian Bina Usaha Kecil dan menengah*

Diharapkan setelah melalui pembinaan dan pelatihan yang diberikan, pelaku usaha kecil dan menengah dapat menerapkan ke dalam usahanya sehingga pelaku usaha kecil dan menengah dapat menghasilkan produk yang berkualitas serta memiliki kemasan yang menarik.

1.2 Pameran Produk Usaha Kecil dan Menengah

Pemasaran merupakan unsur yang penting dalam menjalankan dan mengembangkan suatu usaha serta pemasaran pula yang menentukan tingkat

kemampuan produktifitas suatu usaha. Pemasaran menjadi permasalahan bagi usaha kecil dan menengah di Kabupaten Probolinggo. Rendahnya pemasaran produk usaha kecil dan menengah di Kabupaten Probolinggo karena produk yang dihasilkan masih kalah bersaing dengan produk usaha besar. Usaha besar yang menghasilkan produk yang sama tetapi lebih berkualitas daripada produk yang dihasilkan oleh usaha kecil dan menengah dan kualitas tersebut terletak pada kemasan produk.

Pernyataan tersebut berdasarkan wawancara dengan Bp. Bambang Supriadi selaku Kepala Bidang Bina Usaha Kecil, dan Menengah, sebagai berikut :

"Ya memang tidak bisa dipungkiri pemasaran menjadi kendala bagi usaha kecil, dan menengah dalam menjalankan usahanya, sehingga usaha kecil, dan menengah sulit untuk berkembang mas. Itu terjadi karena produk usaha kecil, dan menengah kalah kualitas dengan produk usaha besar, terus pemasarannya itu beberapa masih belum mengandalkan teknologi seperti internet padahal kan jaman sekarang dibutuhkan." (Wawancara Tanggal 30 September 2014, Pukul 08.00 WIB)

Pernyataan di atas dikuatkan oleh pernyataan Bp. Soengeng selaku Kepala Seksi Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan, sebagai berikut :

"Pemasaran mulai dulu memang menjadi kendala bagi usaha kecil dan menengah mas, ya karena usaha kecil dan menengah masih belum bisa bersaing dengan produk yang dihasilkan usaha besar jadi tidak berkembang tetap disitu – situ saja, itu karena produk usaha kecil dan

menengah kalah kualitas, biasanya kualitas pada segi kemasannya usaha kecil dan menengah kalah, untuk mengatasi itu Dinas menyelenggarakan program promosi dagang." (Wawancara Tanggal 1 Oktober 2014, Pukul 08.00 WIB)

Dalam mengatasi permasalahan pemasaran tersebut, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo melakukan pameran produk melalui program promosi dagang. Promosi dagang merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo untuk mengenalkan produk usaha kecil dan menengah Kabupaten Probolinggo agar dapat dikenal masyarakat baik dalam skala lokal, regional maupun nasional bahkan internasional. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo melakukan promosi dagang bertujuan untuk memperluas jaringan pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah Kabupaten Probolinggo dengan daerah lain serta mensukseskan Program Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Tabel 2. Promosi Dagang UKM Tahun 2013

Tanggal	Tempat	Pameran	Peserta
18 April 2013	Alun – alun Kraksaan	Hari jadi Kabupaten Probolinggo	Kopwan dan UKM dari 24 Kecamatan
12 Juli 2013	Alun – alun Kraksaan	Hari Koperasi	Kopwan dan UKM dari 24 Kecamatan

Sumber : Bagian Bina UKM

Penyelenggaraan program promosi dagang yang diadakan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Probolinggo merupakan upaya pemberdayaan usaha kecil dan menengah yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah. Dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah melakukan rapat dengan pihak pelaku usaha, kecil dan menengah untuk mempersiapkan tanggal dan tempat yang akan dilaksanakannya promosi dagang serta produk yang akan dipromosikan. Rapat tersebut dilakukan sekali sampai tanggal dan tempat penyelenggaraan promosi dagang sudah ditentukan beserta produk usaha yang akan dipamerkan. Jika sudah terkordinir promosi dagang siap untuk digelar dengan jadwal yang sudah ditentukan beserta produk yang akan dipromosikan. Pada saat promosi dagang digelar pihak usaha kecil dan menengah itu sendiri yang nantinya mempromosikan produk unggulannya sedangkan Dinas Keperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo sebagai fasilitator saja.

Hal ini senada dengan pernyataan Bp. Soegeng selaku kepala seksi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan dalam wawancara, sebagai berikut :

"Dalam melakukan promosi dagang itu kita rapat dulu dengan pihak UKM mas, untuk menentukan jadwal dan produk yang akan dipromosikan setelah itu baru diadakan promosi dagang mas, kita disana sebagai fasilitator saja dan yang mengenalkan produknya di promosi

dagang ya pihak UKM itu sendiri." (Wawancara Tanggal 1 Oktober 2014, Pukul 01.00 WIB)

Dengan adanya program promosi dagang tersebut, maka akan menambah jangkauan pemasaran produk usaha kecil dan menengah Kabupaten Probolinggo menjadi lebih luas lagi. Serta dapat menambah motivasi pelaku usaha kecil dan menengah untuk terus berusaha mengembangkan produk usahanya ke depannya nanti. Berikut ini adalah salah satu dokumentasi promosi dagang yang diikuti oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Probolinggo tahun 2013 :

Gambar 2. Pelaksanaan Promosi Dagang



Sumber : Bagian Bina UKM

Dari gambar diatas dapat dikatakan bahwa promosi dagang yang diikuti oleh pelaku usaha kecil dan menengah di berbagai acara dan daerah

merupakan salah satu dari upaya Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Probolinggo dalam melakukan pemberdayaan terhadap usaha kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Probolinggo. Dengan adanya pameran yang diikuti oleh pelaku usaha kecil dan menengah, diharapkan dapat membantu dalam mengenalkan produknya kepada masyarakat luas.

1.3 Bantuan Akses Permodalan

Selama ini akses permodalan yang disediakan secara langsung oleh bank kepada usaha kecil dan menengah tidak sepenuhnya tersalurkan dengan baik. Jika usaha kecil dan menengah melakukan kredit modal untuk usahanya di bank sering kali mengalami kesulitan karena syarat yang diberikan terlalu ketat. Beberapa alasan yang sering ditemukan pihak bank untuk tidak memberikan kredit modal adalah pihak bank menilai usaha yang belum layak serta keterbatasan agunan yaitu tidak setaranya antara jaminan dengan dana yang akan dipinjam. Hal tersebut selaras dengan pernyataan dari Ibu Umu Fatima selaku Kepala Bidang Permodalan, sebagai berikut :

“Salah satu Permasalahan UKM adalah masalah permodalan mas dan itu sudah terjadi secara umum di kebanyakan UKM. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat jika meminjam modal di bank itu sulit mas, karena keterbatasan agunan tetapi saat ini pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah membantu akses permodalan UKM melalui program kredit modal kerja mas.”
(Wawancara Tanggal 1 Oktober 2014, Pukul 10.00 WIB)

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Salah satu permasalahan usaha kecil dan menengah adalah permodalan, dimana hal tersebut dapat menghambat perkembangan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Probolinggo, dan untuk mengatasi permasalahan permodalan tersebut Pemerintahan Daerah melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo menyelenggarakan program kredit modal kerja. Program kredit modal kerja merupakan program hati mesra dari Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo. Kredit modal kerja menganggarkan program perkuatan permodalan bagi koperasi, Usaha kecil dan menengah berupa dana kredit modal kerja yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo. Program perkuatan permodalan ini memberikan kredit modal kerja bagi koperasi, usaha kecil dan menengah. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah juga bekerjasama dengan Bank Jatim Cabang Probolinggo, Bank Jatim Cabang Kraksaan, dan Bank UMKM Jatim Cabang Probolinggo.

Tujuan Program Kredit Modal Kerja, antara lain :

- Memberantas rentenir

- Pembelajaran bagi UKM
- Meringankan beban UKM
- Keuntungan lebih besar
- Kesejahteraan bagi UKM

Persyaratan kredit modal kerja bagi usaha kecil dan menengah, antara lain :

- Berdomisili di Kabupaten Probolinggo
- Mempunyai usaha yang layak (produktif)
- Membutuhkan tambahan modal
- Mempunyai jaminan / agunan
 - ✓ Sertifikat hak milik (SHM)
 - ✓ BPKB kendaraan roda empat (minimal tahun 1998) atau kendaraan roda dua (minimal tahun 2008)
 - ✓ Palfond kredit minimal Rp. 5.000.000,00 dan maksimal Rp. 30.000.000,00

Berikut ini adalah gambar ilustrasi langkah - langkah pengajuan permohonan program kredit modal kerja bagi usaha kecil dan menengah :

Gambar 3. Langkah pengajuan permohonan kredit modal kerja



Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Bagian Bina Usaha Koperasi

Berdasarkan gambar diatas, pihak UKM yang ingin mengajukan permohonan kredit modal kerja melapor kepada kasi ekonomi di kecamatan setempat. Kasi ekonomi kecamatan akan melapor kepada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan selanjutnya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan program kredit modal kerja ini melakukan langkah – langkah teknis sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi kepada calon penerima kredit modal kerja

2. Pembuatan blanko untuk calon penerima kredit modal kerja
3. Penjaringan awal calon penerima kredit modal kerja ke kecamatan
4. Penyeleksian permohonan calon penerima kredit modal kerja melalui kecamatan
5. Membuat jadwal pelaksanaan survey dan identifikasi terhadap calon penerima kredit modal kerja
6. Pengentrian data hasil dari survey dan identifikasi
7. Penyusunan berkas permohonan untuk masuk bank dengan hasil keputusan dari tim survey dilengkapi tanda tangan tim survey
8. Dibuatkan rekomendasi kepala dinas tentang playfond
9. Dibuatkan pengajuan pencairan kredit modal kerja ke bagian keuangan
10. Dibuatkan lampiran dari pengajuan kredit modal kerja ke bagian keuangan
11. Dana kredit modal kerja ditransfer ke bank
12. Dibuatkan jadwal pencairan kredit modal kerja
13. Monitoring dan evaluasi dari lapangan bank dipantau

Saat ini program kredit modal kerja disosialisakan kepada masyarakat yang ingin berwirausaha di Kabupaten Probolinggo. Upaya sosialisasi tersebut dimaksudkan untuk mengenalkan program kredit modal kerja yang

meliputi pengertian program kredit modal kerja, tujuan program kredit modal kerja, syarat program kredit modal kerja bagi UKM, keuntungan kredit modal dan tata cara mengikuti program kredit modal kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo. Dengan adanya sosialisasi tersebut, diharapkan masyarakat yang ingin berwirausaha dapat mengikuti program kredit modal kerja yang sudah difasilitasi oleh pemerintahan daerah.

Tetapi, meskipun sudah dilakukan penyampaian informasi terkait bagaimana dan apa saja yang diperlukan untuk mengikuti program kredit modal kerja, masih terdapat usaha kecil dan menengah yang merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan tersebut. Sebagian besar terkendala dalam membuat dan menyusun proposal pengajuan yang baik dan benar, oleh karena itu Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo membimbing pelaku usaha kecil dan menengah agar bisa membuat proposal dengan baik dan benar. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bp. Soengeng selaku kepala seksi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan dalam wawancara, sebagai berikut :

“Kesulitan pelaku usaha kecil dan menengah untuk ikut program kredit modal kerja itu kesulitan mengajukan proposal mas, sehingga Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo membimbing pelaku usaha kecil dan menengah dalam membuat proposal tersebut.” (Wawancara Tanggal 29 Oktober 2014, Pukul 08.00 WIB)

Dengan adanya program kredit modal kerja untuk usaha kecil dan menengah di Kabupaten Probolinggo terdapat beberapa Usaha Kecil dan Menengah yang mendapatkan modal dari program kredit modal kerja tersebut. Data yang dihimpun Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo melalui bank – bank pelaksanaanya, bahwa usaha kecil dan menengah di Kabupaten Probolinggo yang mendapatkan modal melalui program kredit modal kerja, sebagai berikut :

**Tabel 3. Realisasi Dana Program Kredit Modal Kerja UKM 2013
(Bank Jatim Cabang Kraksaan)**

Nama Pengusaha	Kecamatan	Jumlah (Rp)	Tgl Realisasi
Fitria	Krucil	6.000.000,00	29.04.2013
Adianto	Krucil	6.000.000,00	29.04.2013
Sholehuddin	Krucil	5.000.000,00	29.04.2013
Mialahuddin	Pajajaran	20.000.000,00	29.04.2013
Marji	Krucil	5.000.000,00	29.04.2013
Hasan Basri	Krucil	7.000.000,00	29.04.2013
Suhaemi Dwi Mulyati	Banyuanyar	8.000.000,00	29.04.2013
Tjong Gie Khek	Banyuanyar	20.000.000,00	29.04.2013
Darsih	Krucil	7.000.000,00	29.04.2013
Hudre Saiful Hadri	Gading	5.000.000,00	30.04.2013

Wika Dwi Payana	Tiris	13.000.000,00	30.04.2013
Marpik	Tiris	10.000.000,00	30.04.2013
Moh Zubair	Besuk	10.000.000,00	01.05.2013
Alpi	Maron	6.000.000,00	01.05.2013
Fauzi	Besuk	6.000.000,00	01.05.2013
Siti Halisah Mua	Besuk	10.000.000,00	01.05.2013
Mujazil	Gading	5.000.000,00	01.05.2013
Didik Efendi	Gading	5.000.000,00	01.05.2013
Abdul Hamid	Gading	5.000.000,00	01.05.2013
Nurul Badri	Gading	5.000.000,00	01.05.2013
Sukriyanto	Gading	8.000.000,00	01.05.2013
Yasin	Besuk	10.000.000,00	01.05.2013
H.M Yusuf	Maron	8.000.000,00	02.05.2013
Sihat	Maron	10.000.000,00	02.05.2013
Isminah	Kraksaan	6.000.000,00	02.05.2013
Hasim	Kotaanyar	7.000.000,00	02.05.2013
Kurniadi	Pakuniran	10.000.000,00	02.05.2013
Subaidah	Kotaanyar	7.500.000,00	02.05.2013
Abdullah	Kraksaan	10.000.000,00	02.05.2013
Sura	Kotaanyar	5.000.000,00	03.05.2013

Burawi	Pakuniran	5.000.000,00	06.05.2013
Marzuki	Gading	10.000.000,00	08.05.2013
Aminuddin	Banyuanyar	12.000.000,00	08.07.2013
Samsul	Maron	8.000.000,00	08.07.2013

Sumber : Bagian Permodalan dan Pengendalian

**Tabel 4. Realisasi Dana Program Kredit Modal Kerja UKM 2013
(Bank Jatim Cabang Probolinggo)**

Nama Pengusaha	Kecamatan	Jumlah (Rp)	Tgl Realisasi
Maslifa	Lumbang	15.000.000,00	24.04.2013
Asmun	Lumbang	10.000.000,00	24.04.2013
Yuli Triani	Dringu	10.000.000,00	24.04.2013
Nayukah	Lumbang	20.000.000,00	24.04.2013
Munayar	Dringu	10.000.000,00	24.04.2013
Eny Purwati	Dringu	5.000.000,00	24.04.2013
Tutik Purwantini	Tongas	5.000.000,00	06.05.2013
Sutji Amilda Agustin	Tongas	7.000.000,00	06.05.2013
Anis Andrea Putri	Sumberasih	15.000.000,00	06.05.2013
Supandi	Sumberasih	8.000.000,00	06.05.2013
Ach Masidun	Sumberasih	10.000.000,00	06.05.2013

Khusairi	Sumberasih	5.000.000,00	05.06.2013
Wagiono	Sumberasih	7.000.000,00	05.06.2013
Usrek Sudarmiati	Dringu	10.000.000,00	05.06.2013

Sumber : Bagian Permodalan dan Pengendalian

**Tabel 5. Realisasi Dana Program Kredit Modal Kerja UKM 2013
(Bank UMKM Jatim Cabang Probolinggo)**

Nama Pengusaha	Kecamatan	Jumlah (Rp)	Tgl Realisasi
Sutimbul	Tempuran	20.000.000,00	22.04.2013
Nariyo	Ledoksari	10.000.000,00	22.04.2013
Sujari	Krajan	10.000.000,00	23.04.2013
Ahmad Solihin	Krajan	5.000.000,00	23.04.2013
Abdul Jalil	Krajan	15.000.000,00	23.04.2013
Muhammad Hudri	Karnin	10.000.000,00	24.04.2013
Syamsudin	Karnin	10.000.000,00	25.05.2013
Juliaman	Krajan	10.000.000,00	26.05.2013

Sumber : Bagian Permodalan dan Pengendalian

Perlu ditekankan bahwa Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo hanya perantara usaha kecil dan menengah untuk memperoleh modal melalui program kredit modal kerja jadi tidak ada

anggaran yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo. Peran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagai fasilitator yang memberikan informasi terkait program kredit modal kerja.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam Pemberdayaan Usaha Kecil, dan Menengah di Kabupaten Probolinggo

2.1 Faktor Pendukung

a. Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia

1. Adanya dukungan dari pemerintah

Adapun faktor pendukung dalam upaya pemberdayaan usaha kecil dan menengah Kabupaten probolinggo oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dalam mengatasi permasalahan sumber daya manusia usaha kecil menengah di Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan wawancara dengan Bp. Bambang Supriadi selaku Kepala Bidang Bina Usaha Kecil, dan Menengah, sebagai berikut :

“Kalau faktor pendukungnya itu, adanya komitmen dari kami untuk memberdayakan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Probolinggo yang berdasarkan UU yang baru mas, yaitu UU No. 20 Tahun 2008 sehingga kami termotivasi untuk terus berusaha mengatasi permasalahan UKM di Kabupaten Probolinggo melalui program

pembinaan dan pelatihan tersebut” (Wawancara 30 September 2014, Pukul 08.00 WIB)

Sesuai dengan pernyataan tersebut, maka faktor pendukung upaya pemberdayaan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Probolinggo dalam mengatasi permasalahan sumber daya manusia usaha kecil dan menengah Kabupaten Probolinggo adalah adanya komitmen pemerintah dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah khususnya dalam hal peningkatan mutu sumber daya manusia melalui pembinaan dan pelatihan sumber daya manusia yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Probolinggo.

2. Adanya Partisipasi dari Masyarakat

Faktor pendukung lain dalam upaya pemberdayaan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo khususnya dalam hal peningkatan mutu sumber daya manusia usaha kecil dan menengah adalah adanya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pembinaan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Probolinggo.

Hal tersebut selaras dengan pernyataan Bp. Bambang Supriadi selaku Kepala Bidang Bina Usaha Kecil, dan Menengah, sebagai berikut :

“Faktor pendukung lain ya adanya partisipasi masyarakat dalam mengikuti program pembinaan dan pelatihan kepada pelaku usaha kecil dan menengah itu mas, walaupun ada juga yang tidak berpartisipasi dalam pembinaan dan pelatihan yang kami selenggarakan (Wawancara 30 September 2014, Pukul 08.00 WIB)

Dengan melihat hal tersebut, bahwa upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Probolinggo terhadap usaha kecil dan menengah di Kabupaten Probolinggo dalam hal peningkatan mutu sumber daya manusia adalah upaya bersama antara pemerintah dengan pelaku usaha kecil dan menengah dalam upaya pemberdayaan dalam hal peningkatan mutu sumber daya manusia.

b. Pameran Produk Usaha Kecil dan Menengah

1. Adanya dukungan dari pemerintah

Faktor pendukung dalam upaya pemberdayaan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Probolinggo dalam hal mengatasi permasalahan pemasaran yaitu adanya dukungan dari pemerintah dalam mengatasi permasalahan pemasaran dengan menyelenggarakan program promosi dagang oleh pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo. Hal tersebut senada dengan wawancara dengan Bp. Soengeng selaku Kepala Seksi Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan, sebagai berikut :

“Faktor pendukung kami dalam mengatasi permasalahan pemasaran yaitu adanya dukungan dari pemerintah mas. Jadi pemerintah berkomitmen untuk memberdayakan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Probolinggo yang berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008. Upaya pemberdayaan untuk mengatasi permasalahan pemasaran tersebut pemerintah melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Probolinggo membuat program promosi dagang, jadi itu wujud dari komitmen kami” (Wawancara 4 Oktober 2014, Pukul 08.00 WIB)

Berdasarkan pernyataan tersebut maka faktor pendukung upaya pemberdayaan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Probolinggo dalam mengatasi permasalahan pemasaran usaha kecil dan menengah di Kabupaten Probolinggo adalah adanya komitmen pemerintah dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dalam hal pemasaran melalui penyelenggaraan program promosi dagang.

c. Bantuan Akses Permodalan

1. Adanya dukungan dari pemerintah

Sama halnya dengan faktor pendukung upaya pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam hal peningkatan mutu sumber daya manusia dan pameran produk usaha kecil dan menengah bahwa faktor pendukung upaya pemberdayaan dalam hal bantuan akses permodalan juga adanya dukungan dari pemerintah. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Umu Fatima selaku Kepala Bidang Permodalan, sebagai berikut :

“Dalam upaya pemberdayaan usaha kecil dan menengah khususnya dalam hal membantu akses permodalan kepada usaha kecil dan menengah di Kabupaten Probolinggo, ada faktor pendukungnya mas, yaitu komitmen dari pemerintah untuk memberdayakan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Probolinggo yang berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 sehingga Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Probolinggo membuat program untuk mengatasi permasalahan permodalan tersebut yaitu program kredit modal kerja.” (Wawancara 1 Oktober 2014, Pukul 10.00 WIB)

Sesuai dengan pernyataan tersebut maka faktor pendukung upaya pemberdayaan dalam hal bantuan akses permodalan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Probolinggo kepada usaha kecil dan menengah di Kabupaten Probolinggo yaitu adanya komitmen pemerintah dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan UU No. 20 tahun 2008. Komitmen pemberdayaan pemerintah dalam hal mengatasi permasalahan permodalan tersebut yaitu menyelenggarakan program kredit modal kerja oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo.

2.2 Faktor Penghambat

a. Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia

1. Keterbatasan jumlah tenaga ahli

Salah satu yang menjadi faktor penghambat upaya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam hal peningkatan mutu sumber daya manusia yaitu keterbatasan jumlah

tenaga ahli. Jumlah tenaga ahli yang dimiliki oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo hanya sebanyak 37 orang. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah usaha kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Probolinggo yaitu sebanyak 7400 usaha kecil dan menengah. Melihat hal itu, kesulitan-kesulitan tentu saja dialami oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo untuk melaksanakan pembinaan dan pelatihan dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia.

Pernyataan tersebut sesuai berdasarkan wawancara dengan Bp. Bambang Supriadi selaku Kepala Bidang Bina Usaha Kecil, dan Menengah, sebagai berikut :

“Faktor penghambat Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo dalam melakukan pembinaan dan pelatihan adalah keterbatasan tenaga ahli mas, jumlah tenaga ahli tidak sebanding dengan jumlah usaha kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Probolinggo. Akibatnya, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo mengundang narasumber untuk melakukan pembinaan dan pelatihan itu.” (Wawancara 30 September 2014, Pukul 08.00 WIB)

Dari penelitian selain kendala jumlah tenaga ahli yang tersedia kurang kompetennya tenaga ahli menjadi penghambat upaya pemberdayaan dalam hal peningkatan mutu sumber daya manusia yang dilakukan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo. Kurang kompetennya

pegawai dapat dilihat saat tenaga ahli yang berasal dari luar menjadi narasumber pelatihan-pelatihan yang sedang berlangsung. Hal tersebut dipengaruhi latar pendidikan dari pegawai yang tidak sesuai atau masih rendah. Melihat hal tersebut, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo tidak tinggal diam itu terbukti dengan melakukan diklat atau study banding untuk para pegawai dengan tujuan meningkatkan kompetensi dibidangnya.

2. Terbatasnya anggaran

Salah satu masalah lain yang menghambat upaya pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam hal peningkatan mutu sumber daya manusia yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo adalah terbatasnya anggaran yang diperuntukkan dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Untuk memperoleh hasil yang maksimal tentu saja dibutuhkan dana yang maksimal juga, mengingat banyaknya jumlah usaha kecil dan menengah dan rangkaian pembinaan dan pelatihan dengan tujuan memajukan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Probolinggo. Biaya konsumsi dan uang saku yang harus dianggarkan untuk satu kegiatan pembinaan dan pelatihan. Semua rangkaian pembinaan dan pelatihan memerlukan dana yang memadai jika ingin upaya pemberdayaan

dalam hal peningkatan mutu sumber daya manusia berjalan maksimal berjalan maksimal.

Pernyataan tersebut sesuai berdasarkan wawancara dengan Bp. Bambang Supriadi selaku Kepala Bidang Bina Usaha Kecil, dan Menengah, sebagai berikut :

“Hambatan lainnya adalah keterbatasan anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo dalam melakukan pembinaan dan pelatihan, anggaran itu berupa biaya konsumsi dan uang saku mas.” (Wawancara 30 September 2014, Pukul 08.00 WIB)

Oleh karena itu, seharusnya dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap anggaran yang seharusnya dianggarkan untuk pelaksanaan pembinaan dan pelatihan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Probolinggo. Hal ini perlu dilakukan agar upaya pemberdayaan dalam hal peningkatan mutu sumber daya manusia yaitu pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia usaha kecil dan menengah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diinginkan.

b. Pameran Produk Usaha Kecil dan Menengah

1. Pelaku usaha kecil dan menengah sering beralih produk

Permasalahan lain yang dapat menghambat upaya pemberdayaan yaitu seringnya pelaku usaha kecil dan menengah beralih produk. Hal ini disebabkan banyaknya produk di pasar yang mempunyai daya tarik tinggi

sangat mempengaruhi pelaku usaha dalam mempertahankan produknya. Seiring berkembangnya jaman, banyak jenis dan tampilan yang lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola suatu produk. Penampilan yang bagus tentu saja menunjang penampilan produk mereka. Oleh karena itu, pelaku usaha yang sudah lama bertahan dengan produk lama mereka banyak yang tergiur dengan perkembangan jaman yang begitu cepat. Mereka memilih beralih ke produk yang lebih mudah didapat bahan baku dan mengikuti perubahan jaman.

Kelemahan dari usaha kecil dan menengah yaitu sering berganti produk usaha mereka tanpa melaporkan ke Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo. Hal ini, harus dihindari karena dapat menghambat jalannya upaya pemberdayaan yang sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo secara berkelanjutan untuk membina usaha kecil dan menengah agar lebih maju dan produktif lagi. Hal ini juga dipengaruhi oleh sifat dari pelaku usaha kecil dan menengah itu sendiri, yaitu kurang ulet dan tekun dalam menjalankan usahanya.

Pernyataan tersebut sesuai berdasarkan wawancara dengan Bp. Soegeng selaku Kepala Seksi Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan, sebagai berikut :

“Faktor pendukung Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo dalam melakukan promosi dagang adalah pelaku usaha kecil dan menengah yang sering berganti produk mas. Jadi produk yang sudah diperkenalkan atau dipamerkan melalui promosi dagang tidak diproduksi lagi karena pelaku usaha kecil dan menengah beralih produk, sehingga usaha memasarkan produk pelaku usaha melalui promosi dagang tersebut kepada masyarakat luas menjadi sia - sia.” (Wawancara 4 Oktober 2014, Pukul 08.00 WIB)

Hal ini tentu saja harus diselesaikan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk terus memberikan masukan dan nasehat agar pelaku usaha kecil dan menengah tekun dan ulet terhadap usaha yang dikelolanya. Jika seringnya berganti atau beralih produk, maka hal itu akan menghambat upaya pemberdayaan usaha kecil dan menengah dan dapat merugikan pelaku usaha kecil dan menengah itu sendiri karena banyak pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk membeli peralatan atau bahan baru yang baru.

c. Bantuan Akses Permodalan

1. Pelaku usaha kecil dan menengah kurang responsif

Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo dalam melakukan pemberdayaan dalam

hal bantuan akses permodalan melalui program kredit modal kerja yaitu pelaku usaha kecil dan menengah yang kurang responsif. Beberapa pelaku usaha kecil dan menengah yang belum tahu dan paham tentang program kredit modal kerja yang telah dicanangkan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Hal tersebut sesuai dalam wawancara dengan Ibu Umu Fatima selaku Kepala Bidang Permodalan, sebagai berikut :

“Pelaku usaha di Kabupaten Probolinggo beberapa masih belum ada yang tahu atau paham tentang program kredit modal kerja dari pemerintah ini mas. Untuk itu Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo terus melakukan sosialisasi program kredit modal kerja kepada pelaku usaha. Kegiatan sosialisasi program kredit modal kerja ini akan kami prioritaskan.” (Wawancara Tanggal 1 Oktober 2014, Pukul 10.00 WIB)

Dengan demikian, hambatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo dalam melakukan penyelenggaraan program kredit modal kerja muncul dari pelaku usaha kecil dan menengah itu sendiri. Dalam hal ini pelaku usaha kecil dan menengah tidak menjemput bola terhadap program kredit modal kerja yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo sehingga dapat disimpulkan pelaku usaha kecil dan menengah kurang responsif terhadap akses bantuan permodalan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Untuk mengatasi hal tersebut Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terus berupaya melakukan sosialisasi

program kredit modal kerja kepada usaha kecil dan menengah di Kabupaten Probolinggo.

C. Analisis dan Pembahasan

Dalam setiap penelitian dan penulisan tentunya diperlukan adanya analisis dan interpretasi data yang telah dikumpulkan, diolah dan disajikan maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisa dan interpretasi data-data tersebut. Berdasarkan jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu deskriptif kualitatif maka secara sistematis penulis akan menggambarkan fakta-fakta yang ada dilapangan yang diperoleh dari hasil penelitian, dikaitkan dengan teori-teori yang ada kemudian dipelajari mengenai hubungan dan fokus penelitian.

Analisis dan interpretasi data yang penulis sajikan secara berurutan sesuai dengan obyek studi. Adapun analisa dan interpretasi data dari masing-masing data dapat menghasilkan deskripsi sebagai berikut ini:

a. Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia

Salah satu upaya yang dilakukan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah yaitu peningkatan mutu sumberdaya manusia. Rendahnya kemampuan pelaku usaha kecil dan menengah sangat mempengaruhi proses pemberdayaan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Tambunan (2002:73)

yaitu masalah yang dihadapi usaha kecil dan menengah salah satunya adalah keterbatasan sumberdaya manusia. Hal ini sesuai dengan keadaan sumberdaya manusia yang ada di Kabupaten Probolinggo. Pelaku usaha kecil dan menengah di Kabupaten probolinggo memiliki kemampuan yang terbatas dalam hal pengetahuan dan keterampilan. Rendahnya pendidikan pelaku dari para usaha kecil dan menengah juga mempunyai andil yang cukup besar. Hal ini tentu saja sangat menyulitkan usaha kecil dan menengah untuk mengelola usahanya agar lebih berkembang lagi. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan dan pelatihan untuk para pelaku usaha kecil dan menengah yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo.

Pembinaan dan pelatihan yang dilakukan merupakan upaya dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten probolinggo sebagai bagian dari proses pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Pembinaan dan pelatihan yang dilakukan merupakan upaya pemerintah, khususnya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo yang meliputi pemberian pengetahuan dan keterampilan. Semua itu diberikan kepada pelaku usaha kecil dan menengah agar dapat mengelola usahanya lebih baik lagi. Sumberdaya manusia merupakan kunci usaha agar bisa berkembang dan maju.

Upaya pemberdayaan dalam hal peningkatan mutu atau kualitas sumberdaya manusia melalui pembinaan dan pelatihan kepada pelaku usaha kecil dan menengah sesuai dengan model pemberdayaan yang dikemukakan oleh Suryono (2010:264) yaitu model pemberdayaan *people center development*. Model pemberdayaan mengatakan peningkatan kapasitas manusia sangat mempengaruhi dan menentukan masa depan suatu usaha di masa yang akan datang salah satu yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Hal ini pembinaan dan pelatihan dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo berupa pembinaan. Misalnya pembinaan kewirausahaan dan manajemen bagi usaha kecil dan menengah di Kabupaten Probolinggo. Diadakannya pembinaan tersebut terkait usaha kecil dan menengah, akan dapat menjadikan usaha kecil dan menengah yang lebih tangguh.

Adapun pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo yaitu antara lain meliputi pelatihan dalam hal menghasilkan produk dan kemasan produk. Harapannya setelah menerima pembinaan dan pelatihan tersebut, pelaku usaha kecil dan menengah di Kabupaten Probolinggo mempunyai inovasi – inovasi terhadap produk serta menjadi usaha kecil dan menengah yang tangguh dan mandiri.

Hal yang dijelaskan tersebut sesuai dengan tahap transformasi yang dikemukakan oleh Sulistyani (2004:83) yaitu pemberian kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan sehingga dapat terbentuk kemampuan untuk mandiri. Tahap transformasi kemampuan merupakan tahap dimana pelaku usaha kecil dan menengah menerima pembinaan dan pelatihan yang diharapkan mengantarkan usaha kecil dan menengah agar lebih berkembang lagi pemikiran – pemikirannya serta untuk lebih terampil dan inovatif lagi dalam mengembangkan dan memajukan usahanya.

Berdasarkan hasil penelitian, pemberdayaan usaha kecil dan menengah terkait pemberian pembinaan dan pelatihan kepada pelaku usaha kecil dan menengah di Kabupaten Probolinggo oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo sudah baik.

b. Pameran Produk Usaha Kecil dan Menengah melalui Pameran

Produk yang sudah dihasilkan oleh usaha kecil dan menengah di Kabupaten Probolinggo perlu diperkenalkan kepada masyarakat luas agar usahanya dapat berkembang. Dalam hal ini, upaya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo yaitu memberikan akses yang lebih luas kepada produk-produk usaha kecil dan menengah yang masih

lemah dalam hal penjualan. Hal ini dilakukan untuk menunjang penjualan produk usaha kecil dan menengah serta agar produk usaha kecil menengah Kabupaten Probolinggo juga dapat dikenal semakin luas tidak hanya di tingkat lokal, tapi regional atau bahkan nasional serta tidak menutup kemungkinan juga dapat ke tingkat internasional. Hal ini seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 7 tentang penumbuhan iklim usaha yang salah satunya meliputi aspek promosi dagang yang bertujuan menyebarluaskan atau memperkenalkan produk usaha kecil dan menengah.

Salah satu upaya untuk memperkenalkan produk usaha kecil dan menengah oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo melalui program promosi dagang yaitu dengan mengadakan atau mengikutkan usaha kecil dan menengah di pameran-pameran. Dengan diadakannya pameran-pameran ini, diharapkan pelaku usaha kecil dan menengah dapat lebih mengenalkan produk mereka, menambah jumlah penjualan produk yang nantinya juga akan berimbas bertambahnya hasil penjualan produk mereka. Serta di pameran tersebut, juga diharapkan pelaku usaha kecil dan menengah dapat bertemu dengan pelaku usaha kecil dan menengah yang lain kemudian bertukar informasi yang bertujuan untuk mengembangkan usaha mereka.

Penyelenggaraan program promosi dagang merupakan salah satu upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kartasmita yang dikutip oleh Nasirin dan Alamsyah (2010:89) yang menyebutkan bahwa menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang karena setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemerintah mendukung dalam penciptaan iklim usaha dengan cara memberi kesempatan yang sama untuk usaha kecil dan menengah agar dapat memperkenalkan produk usaha dan kemudian mencari konsumennya masing – masing.

Dengan adanya pengenalan produk usaha kecil dan menengah melalui promosi dagang yang diadakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo, juga sesuai dengan yang dikemukakan oleh Hasfah (2004:43), salah satu yang perlu dikembangkan yaitu promosi, hal itu bertujuan untuk mempercepat proses kemitraan usaha kecil dan menengah dengan usaha besar yang lain. Dalam hal ini, upaya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo dalam hal pengenalan produk usaha kecil dan menengah adalah melalui promosi dagang. Dengan adanya promosi dagang tersebut juga diharapkan pelaku usaha kecil dan menengah mendapatkan manfaat terkait kemajuan produk

usahanya. Juga tidak menutup kemungkinan dapat menumbuhkan ide atau inovasi untuk memperbaiki produknya di masa yang akan datang. Disediakkannya pameran produk melalui promosi dagang tersebut, akan sangat membantu pelaku usaha kecil dan menengah untuk menyebarluaskan dan memperkenalkan produk usaha mereka di masyarakat luas. Selain itu, di sisi yang lain program promosi dagang juga menguntungkan bagi pemerintah Kabupaten Probolinggo, karena dengan promosi dagang yang diadakan di berbagai wilayah terutama di luar Kabupaten Probolinggo dapat mengenalkan produk-produk unggulan yang ada di daerahnya.

c. Bantuan Terhadap Akses Permodalan

Bagian yang tidak kalah penting bagi pelaku usaha kecil dan menengah adalah modal. Modal merupakan roda penggerak usaha kecil dan menengah dalam memproduksi suatu produk. Modal sangat diperlukan oleh semua pelaku usaha kecil dan menengah mulai untuk membeli bahan baku, proses produksi sampai pemasaran ke konsumen. Sebagian besar permasalahan yang dihadapi usaha kecil dan menengah adalah sulit dalam mendapatkan modal. Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo memberikan akses bantuan permodalan melalui program kredit modal kerja.

Dengan modal, pelaku usaha kecil dan menengah akan bisa menjalankan produksi usahanya dan bahkan mengembangkan lebih besar lagi. Tetapi, masalah akses untuk mendapatkan permodalan masih menjadi masalah utama yang dihadapi oleh usaha kecil dan menengah. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Primiana (2009:19-21) yaitu masalah yang dihadapi usaha kecil dan menengah salah satunya adalah kurangnya akses ke bank, lembaga kredit atau sumber pembiayaan lainnya.

Sebagian besar masalah yang dihadapi usaha kecil dan menengah di Kabupaten Probolinggo adalah permodalan. Usaha kecil dan menengah kurang mengerti bagaimana agar bisa mendapatkan bantuan modal dari lembaga keuangan serta masih ketidaktahuannya pelaku usaha kecil dan menengah dengan adanya bantuan akses permodalan melalui kredit modal kerja dari pemerintah. Oleh karena itu, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo melakukan upaya pemberdayaan terkait permodalan salah satunya dengan memberikan informasi bagaimana atau syarat-syarat apa saja yang diperlukan untuk mengajukan program kredit modal kerja.

Hal ini tercantum pada undang-undang nomer 20 tahun 2008 pasal 10 yang menyatakan bahwa pemerintah yang dalam hal ini adalah Dinas

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku usaha kecil dan menengah. Harapannya dengan adanya bantuan akses permodalan usaha kecil dan menengah melalui program kredit modal kerja dari pemerintahan daerah yang diselenggarakan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo dapat memberi kemajuan yang signifikan dalam mengembangkan dan memajukan usaha di Kabupaten Probolinggo.

Hal tersebut sesuai dengan pendekatan pemberdayaan 5P yang dikemukakan oleh Suharto (2009:67). Dengan menciptakan iklim dan suasana yang memungkinkan. Pendekatan pemberdayaan tersebut yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo yaitu terkait pemberian bantuan akses terhadap permodalan melalui program kredit modal kerja yang berupa pemberian informasi program kredit modal kerja dan bagaimana menyusun proposal yang baik sesuai standar yang kemudian diajukan kepada kasi ekonomi kecamatan setempat yang selanjutnya disampaikan ke Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo.

Sesuai yang dikemukakan oleh Tambunan (2002:146) yang menyatakan bahwa peran pemerintah daerah maupun pemerintah distrik

dengan spesifik yaitu penyiapan laporan-laporan, syarat-syarat ataupun rekomendasi-rekomendasi terhadap pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil dan menengah pemerintah daerah. Hal ini Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo membuat usulan usaha kecil dan menengah yang telah mempunyai persyaratan yang layak kemudian direkomendasikan untuk mendapatkan bantuan permodalan melalui program kredit modal kerja dari pemerintah. Hal ini juga didukung Undang-Undang nomer 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pasal 8 yaitu pemerintah memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi usaha mikro, kecil dan menengah untuk dapat mengakses bantuan permodalan.

Berdasarkan penelitan, bahwa tidak semua usaha kecil dan menengah mengajukan bantuan permodalan melalui program kredit modal kerja. Masih banyak pelaku usaha kecil dan menengah yang menjalankan usahanya dari modal sendiri dengan alasan tidak ingin berbelit-belit. Hal ini terbukti meskipun usaha kecil dan menengah pernah mencoba mengajukan program kredit modal kerja melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada kenyataannya tidak semua pengajuan dari usaha kecil dan menengah tersebut mendapat persetujuan. Hanya usaha kecil dan menengah yang sesuai dengan penilaian dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo saja yang dapat mengikuti program tersebut.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah yang dilakukan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo

2.1 Faktor Pendukung

a. Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia

1. Adanya dukungan dari pemerintah

Faktor pendukung dalam upaya pemberdayaan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Probolinggo oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo dalam hal peningkatan mutu sumber daya manusia adalah adanya komitmen pemerintah sesuai dengan UU No. 20 tahun 2008 tentang pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah khususnya dalam hal peningkatan mutu sumber daya manusia melalui pembinaan dan pelatihan sumber daya manusia yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Probolinggo.

2. Adanya Partisipasi dari Masyarakat

Faktor pendukung lain dalam upaya pemberdayaan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo khususnya dalam hal peningkatan mutu sumber daya manusia usaha kecil dan menengah

adalah adanya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pembinaan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo.

b. Pameran Produk Usaha Kecil dan Menengah

1. Adanya dukungan dari pemerintah

Faktor pendukung dalam upaya pemberdayaan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo dalam hal mengatasi permasalahan pemasaran yaitu adanya komitmen dari pemerintah sesuai dengan UU No. 20 tahun 2008 tentang pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah khususnya untuk mengatasi permasalahan pemasaran dengan menyelenggarakan program promosi dagang oleh pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo.

c. Bantuan Akses Permodalan

1. Adanya dukungan dari pemerintah

Sama halnya dengan faktor pendukung upaya pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam hal peningkatan mutu sumber daya manusia dan pameran produk usaha kecil dan menengah bahwa faktor pendukung upaya pemberdayaan dalam hal bantuan akses permodalan juga adanya dukungan dari pemerintah.

Faktor pendukung upaya pemberdayaan dalam hal bantuan akses permodalan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Probolinggo kepada usaha kecil dan menengah di Kabupaten Probolinggo yaitu adanya komitmen pemerintah dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan UU No. 20 tahun 2008. Komitmen pemberdayaan pemerintah dalam hal mengatasi permasalahan permodalan tersebut yaitu menyelenggarakan program kredit modal kerja oleh pemerintahan daerah melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo.

2.2 Faktor Penghambat

a. Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia

1. Keterbatasan jumlah tenaga ahli

Salah satu yang menjadi faktor penghambat upaya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam hal peningkatan mutu sumber daya manusia yaitu keterbatasan jumlah tenaga ahli. Jumlah tenaga ahli yang dimiliki oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo hanya sebanyak 37 orang. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah usaha kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Probolinggo yaitu sebanyak 7400 usaha kecil dan

menengah. Melihat hal itu, kesulitan-kesulitan tentu saja dialami oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo untuk melaksanakan pembinaan dan pelatihan dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia.

Selain kendala jumlah tenaga ahli yang tersedia, juga kurang kompetennya tenaga ahli menjadi penghambat upaya pemberdayaan dalam hal peningkatan mutu sumber daya manusia yang dilakukan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo. Kurang kompetennya pegawai dapat dilihat saat tenaga ahli yang berasal dari luar menjadi narasumber pelatihan-pelatihan yang sedang berlangsung. Hal tersebut dipengaruhi latar pendidikan dari pegawai yang tidak sesuai atau masih rendah. Melihat hal tersebut, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo tidak tinggal diam itu terbukti dengan melakukan diklat atau study banding untuk para pegawai dengan tujuan meningkatkan kompetensi dibidangnya.

2. Terbatasnya anggaran

Salah satu masalah lain yang menghambat upaya pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam hal peningkatan mutu sumber daya manusia yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten

Probolinggo adalah terbatasnya anggaran yang diperuntukkan dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Untuk memperoleh hasil yang maksimal tentu saja dibutuhkan dana yang maksimal juga, mengingat banyaknya jumlah usaha kecil dan menengah dan rangkaian pembinaan dan pelatihan dengan tujuan memajukan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Probolinggo. Biaya konsumsi dan uang saku yang harus dianggarkan untuk satu kegiatan pembinaan dan pelatihan. Semua rangkaian pembinaan dan pelatihan memerlukan dana yang memadai jika ingin upaya pemberdayaan dalam hal peningkatan mutu sumber daya manusia berjalan maksimal berjalan maksimal.

Oleh karena itu, seharusnya dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap anggaran yang seharusnya dianggarkan untuk pelaksanaan pembinaan dan pelatihan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Probolinggo. Hal ini perlu dilakukan agar upaya pemberdayaan dalam hal peningkatan mutu sumber daya manusia yaitu pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia usaha kecil dan menengah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diinginkan.

b. Pameran Produk Usaha Kecil dan Menengah

1. Pelaku usaha kecil dan menengah sering beralih produk

Permasalahan lain yang dapat menghambat upaya pemberdayaan yaitu seringnya pelaku usaha kecil dan menengah beralih produk. Hal ini disebabkan banyaknya produk di pasar yang mempunyai daya tarik tinggi sangat mempengaruhi pelaku usaha dalam mempertahankan produknya. Seiring berkembangnya jaman, banyak jenis dan tampilan yang lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola suatu produk. Penampilan yang bagus tentu saja menunjang penampilan produk mereka. Oleh karena itu, pelaku usaha yang sudah lama bertahan dengan produk lama mereka banyak yang tergiur dengan perkembangan jaman yang begitu cepat. Mereka memilih beralih ke produk yang lebih mudah didapat bahan baku dan mengikuti perubahan jaman.

Kelemahan dari usaha kecil dan menengah yaitu sering berganti produk usaha mereka tanpa melaporkan ke Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo. Hal ini, harus dihindari karena dapat menghambat jalannya upaya pemberdayaan yang sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo secara berkelanjutan untuk membina usaha kecil dan menengah agar lebih maju dan produktif lagi. Hal ini juga dipengaruhi oleh sifat dari pelaku usaha kecil dan

menengah itu sendiri, yaitu kurang ulet dan tekun dalam menjalankan usahanya.

Hal ini tentu saja harus diselesaikan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk terus memberikan masukan dan nasehat agar pelaku usaha kecil dan menengah tekun dan ulet terhadap usaha yang dikelolanya. Jika seringnya berganti atau beralih produk, maka hal itu akan menghambat upaya pemberdayaan usaha kecil dan menengah dan dapat merugikan pelaku usaha kecil dan menengah itu sendiri karena banyak pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk membeli peralatan atau bahan baru yang baru.

c. Bantuan Akses Permodalan

1. Pelaku usaha kecil dan menengah kurang responsif

Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo dalam melakukan pemberdayaan dalam hal bantuan akses permodalan melalui program kredit modal kerja yaitu pelaku usaha kecil dan menengah yang kurang responsif. Beberapa pelaku usaha kecil dan menengah yang belum tahu dan paham tentang program kredit modal kerja yang telah dicanangkan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Dengan demikian, hambatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo dalam melakukan penyelenggaraan program kredit modal kerja muncul dari pelaku usaha kecil dan menengah itu sendiri. Dalam hal ini pelaku usaha kecil dan menengah tidak menjemput bola terhadap program kredit modal kerja yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo sehingga dapat disimpulkan pelaku usaha kecil dan menengah kurang responsif terhadap akses bantuan permodalan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Untuk mengatasi hal tersebut Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terus berupaya melakukan sosialisasi program kredit modal kerja kepada usaha kecil dan menengah di Kabupaten Probolinggo.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya diketahui bahwa usaha kecil dan menengah merupakan sektor yang keberadaannya penting dalam perekonomian nasional. Namun, usaha kecil dan menengah dihadapkan dengan beberapa permasalahan. Khususnya permasalahan - permasalahan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Probolinggo yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu sumber daya manusia, pemasaran dan permodalan

Dengan melihat permasalahan – permasalahan tersebut pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah melakukan upaya pemberdayaan dalam hal peningkatan mutu sumber daya manusia, pameran produk usaha kecil dan menengah serta bantuan akses permodalan. Upaya pemberdayaan tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi Usaha Menengah Kabupaten Probolinggo dengan menyelenggarakan program – program. Pertama, program pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia. Pembinaan yang

diberikan berupa pendidikan dan pengetahuan yang berkaitan dengan kewirausahaan serta pelatihan yang diberikan berupa bagaimana menghasilkan produk dan mengelola pengemasan produk. Kedua, Program kredit modal kerja agar dapat meningkatkan akses permodalan. Program ini penting untuk menjawab atas kesulitan akses permodalan usaha kecil dan menengah terhadap perbankan yang disebabkan terlalu ketatnya persyaratan yang diberikan. Ketiga, program promosi dagang dimana promosi dagang merupakan upaya untuk mengenalkan produk usaha kecil dan menengah agar dapat dikenal masyarakat baik dalam skala lokal, regional maupun nasional bahkan internasional.

Adapun faktor pendukung dalam melakukan upaya pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam hal peningkatan mutu sumber daya manusia, pameran produk usaha kecil dan menengah serta bantuan akses permodalan yaitu adanya dukungan dari pemerintah yang berkomitmen untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah yang sesuai dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008. Sedangkan faktor penghambat dalam melakukan upaya pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam hal peningkatan mutu sumber daya manusia yaitu keterbatasan jumlah tenaga ahli dan terbatasnya anggaran. Dalam hal pameran produk usaha kecil dan menengah yaitu pelaku usaha kecil dan menengah sering beralih produk.

Sedangkan faktor penghambat dalam hal bantuan akses permodalan yaitu pelaku usaha kecil dan menengah kurang resposif dengan program kredit modal kerja yang disediakan pemerintah daerah.

B. Rekomendasi

Usaha Kecil dan Menengah merupakan bentuk usaha yang dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat dan memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan struktur perekonomian daerah yang tentu saja akan berpengaruh terhadap pembentukan struktur ekonomi nasional. Berkaitan dengan itu peran pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tentu diperlukan dalam mengatasi permasalahan – permasalahan yang dihadapi oleh usaha kecil dan menengah khususnya di Kabupaten Probolinggo. Dengan melihat hal tersebut, peneliti merekomendasikan Dinas Kabupaten Probolinggo untuk memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Perlunya menyelenggarakan diklat atau pelatihan untuk pegawai menjadi tenaga ahli dalam mendukung pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Hal ini sangat bermanfaat saat kegiatan pelatihan usaha kecil dan menengah dalam penyampaian materi terkait pelatihan tertentu.

- Mengingat tidak semua pegawai memiliki latar belakang mengenai usaha kecil dan menengah.
- b. Perlunya melakukan pengkajian ulang terhadap besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan rangkaian kegiatan pemberdayaan agar berjalan maksimal sesuai yang diharapkan. Mengingat dalam melakukan kegiatan pemberdayaan memerlukan dana yang cukup besar.
 - c. Perlunya memudahkan para pelaku usaha kecil dan menengah untuk memperoleh bantuan modal melalui program kredit modal kerja.
 - d. Perlunya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah menjadikan usaha kecil dan menengah sebagai partner kerja yang baik sehingga tidak ada kecanggungan atau jarak antara pemberi dan penerima program kerja. Harapannya komunikasi akan berjalan baik, serta tidak akan terjadi lagi pelaku usaha kecil dan menengah yang beralih produk tanpa memberitahukan kepada dinas yang terkait.
 - e. Perlunya melakukan pendataan ulang secara berkala kepada seluruh usaha kecil dan menengah di Kabupaten Probolinggo. Setelah itu membuat data yang akurat di dalam komputer tentang keberadaan usaha kecil dan menengah. Misalnya mulai kapan berdiri, produk apa saja yang dihasilkan, pernah menerima bantuan apa saja dan lain-lain.



DAFTAR PUSTAKA

- Hafsah, Muhammad jaffar. 2004. *Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah*. Infokop, Nomor 25 Tahun XXX: 40 44.
- Moleong, J Lexy. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Miles, Matthew B, Michael. A. Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Mardikanto, T dan Poerwoko, Subianto. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat: Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Nasirin, Chairun dan Alamsyah. 2010. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Good Governance*. Malang: Indo Press.
- Nazir, Mohammad. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Poerwandari, E .K. 1998. *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*. Jakarta : Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi UI.
- Pranarka dan Moeljarto. 1996. *Pemberdayaan Konsep Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Primiana, Ina. 2009. Menggerakkan Sektor Riil UKM dan Industri. Bandung

: Alfabeta Bandung

Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah Kabupaten

Probolinggo Tahun 2013 - 2018

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:

Alfabeta

Siagian, Sondang. 1996. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Bumi Aksara.

Siagian, Sondang. 2012. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan*

Strateginy. Jakarta : Bumi Aksara.

Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat: Memberdayakan Rakyat*.

Bandung: Refika Aditama.

Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom*

dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta : Citra Utama.

Suryono, Agus. 2010. *Dimensi – Dimensi Prima Teori Pembangunan*.

Malang: UB Press.

Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat : Memberdayakan Rakyat*.

Bandung : Refika Aditama.

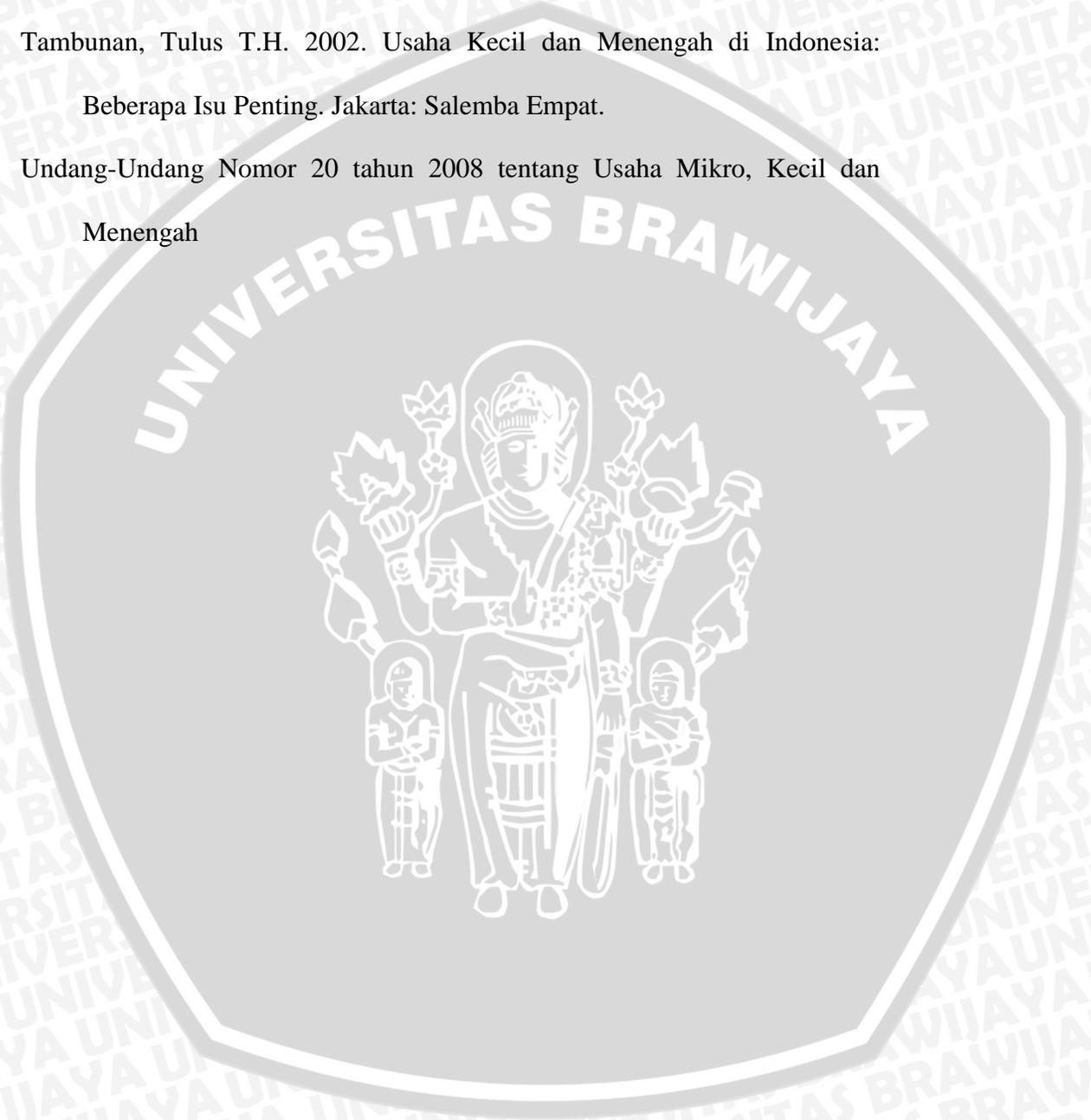
Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model – Model*

Pemberdayaan. Yogyakarta : IKAPI.

Susanta, Gatut dan M. Azzin Syamsuddin. 2009. Cara Mudah Mendirikan dan Mengelola UMKM. Depok : Raib Asa Sukses.

Tambunan, Tulus T.H. 2002. Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah





L A M P I R A N



CURRICULUM VITAE



Nama : Rayan Bagus Aprianto
Fakultas : Fakultas Ilmu Administrasi
NIM : 105030107111016
Email : RayanBA@gmail.com
TTL : Probolinggo, 12 April 1992
Hobby : Silat dan Band
Pendidikan : 1. SDN Sukabumi 4 Probolinggo Tamat Tahun 2004
2. SMPN 10 Probolinggo Tamat Tahun 2007
3. SMAN 2 Probolinggo Tamat Tahun 2010
4. Lulusan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
Malang Tahun 2014
Pekerjaan : -
Publikasi atau karya ilmiah : -



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Jend. Achmad Yani No. 11 Telp. (0335) 421365, Fax 421365
PROBOLINGGO Kode Pos 67219

SURAT KETERANGAN

Dengan surat ini kami menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Rayan Bagus Aprianto
NIM : 105030107111016
Fakultas : Ilmu Administrasi
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Universitas : Universitas Brawijaya Malang

Telah diijinkan dan selesai melakukan penelitian di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo selama 1 (satu) bulan untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi. Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Probolinggo, 3 November 2014

An. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil
dan Menengah Kabupaten Probolinggo

Sekretaris



Radi, SH, M.Hum

NIP. 19580117 198203 1 007

Foto Dokumentasi Penelitian

Wawancara dengan Bp. Bambang Supriadi selaku Kepala Bidang Bina Usaha Kecil, dan Menengah



Wawancara dengan Bp. Soegeng selaku Kepala Seksi Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan



Wawancara dengan Ibu Umu Fatima selaku Kepala Bidang Permodalan

